

**STRATEGI ORGANISASI PAPUA MERDEKA
DALAM MENDAPATKAN DUKUNGAN INTERNASIONAL
TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI



Oleh :

ADITYA CHAIRANI PUTRI

18323149

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2022

**STRATEGI ORGANISASI PAPUA MERDEKA
DALAM MENDAPATKAN DUKUNGAN INTERNASIONAL
TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh :

ADITYA CHAIRANI PUTRI

18323149

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

STRATEGI ORGANISASI PAPUA MERDEKA DALAM MENDAPATKAN DUKUNGAN INTERNASIONAL TAHUN 2016-2020

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

23 Maret 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



(Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A)

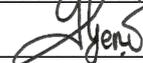
Dewan Penguji

1. Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A
2. Hadza Min Fadhli Robbi, M.Sc.
3. Gustrini Putri, M.A

Tanda Tangan







PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Aditya Chairani Putri

NIM : 18323149

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : STRATEGI ORGANISASI PAPUA MERDEKA

DALAM MENDAPATKAN DUKUNGAN INTERNASIONAL
TAHUN 2016-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas. Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

22 Maret 2022



Aditya Chairani Putri

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil'alamin

Karya ini saya persembahkan untuk :

Ayah, Ibu, Abang, Ayuk, dan Cik

Atas segala doa, dukungan, nasihat, dan semangat yang selalu ditujukan kepada
saya dalam segala hal.

Seluruh Keluarga Besar

Atas segala dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada saya

Teman-Teman HI UII Angkatan 2018

Atas segala kebersamaan, kebahagiaan, dan segala bentuk kenangan indah yang
pernah dilalui bersama selama kuliah di HI UII

HALAMAN MOTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5)

“Skripsi yang baik adalah skripsi yang dikerjakan”

(Bapak Hangga Fathana)

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, nikmat dan ridha yang diberikan-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam selalu tertuju kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prosesnya, banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa yang tulus. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada saya, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
3. Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si.
4. Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A.
5. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan atas bimbingan, bantuan, serta dukungan yang terus diberikan kepada saya. Terima kasih telah memberikan begitu banyak saran dan masukan selama proses pengerjaan skripsi saya. Terima kasih atas waktu yang telah bapak berikan untuk membimbing saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Yang terakhir, terima kasih untuk semua motivasi yang telah bapak sampaikan kepada saya sehingga membuat saya selalu bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Tanpa bantuan dan dukungan bapak, saya mungkin tidak akan bisa sampai ditahap ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama saya menjadi mahasiswa bimbingan bapak, saya telah melakukan kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan. Semoga Pak Hangga senantiasa dalam lindungan Allah SWT serta selalu diberikan kesehatan, dan keberkahan.

6. Seluruh Dosen dan Staff Prodi Hubungan Internasional UII, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada saya selama saya berkuliah di UII.
7. Kepada Ayah dan Ibu saya, terima kasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, nasihat, serta bantuannya kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan S1 saya. Terima kasih untuk segala pengorbanan dan keringat yang tcurahkan kepada saya disetiap proses hidup saya. Terima kasih telah menjadi orang tua yang baik, menjadi panutan yang baik bagi saya untuk melanjutkan hidup saya. Semoga ayah dan ibu senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, nikmat, keberkahan, serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada Abang Reza, Ayuk Runi, Cik Rara, Kak Fya, Abang Desmi, Fariz, Fahri, Feyzal, dan Arjuna. Terima kasih saya ucapkan untuk segala dukungan, doa, nasihat, dan bantuannya kepada saya hingga saya mampu menyelesaikan pendidikan S1 saya. Terima kasih telah menjadi saudara dan ponakan yang selalu memberikan dukungannya untuk saya dalam setiap

proses dihidup saya. Semoga Allah senantiasa memberikan umur yang panjang, kesehatan, rezeki yang berlimpah bagi kita semua.

9. Kepada Dhea Budi Arista, terima kasih telah menjadi sosok sahabat yang selalu ada dalam keadaan suka maupun duka. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi saya. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, nikmat, serta rezeki yang berlimpah.
10. Kepada Ratih Meiranda Putri dan Brillian Nindy Septia, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dihidup saya. Terima kasih telah mewarnai hidup saya dengan berbagai candaan. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik saya, semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya.
11. Kepada Wulan Sintia Minowati, terima kasih telah menjadi sahabat teman, keluarga, serta sahabat yang selalu memberikan dukungannya, doanya, serta nasihatnya kepada saya. Terima kasih sudah mau menjadi pendengar dan pemberi nasihat yang baik kepada saya.
12. Kepada Anastasia Zueini Goldy, Wilda, Andi Dewi Fortuna Fatwa, Teddy Farhan, dan Annisa Kurnia, terima kasih sudah menjadi teman, keluarga, dan sahabat baik saya. Terima kasih banyak atas segala bantuan, dukungan, canda tawa yang diberikan kepada saya. Terima kasih sudah menjadi tempat bagi saya untuk berdiskusi dalam hal apapun, terima kasih sudah menjadi tempat bagi saya untuk mengeluh, untuk mencurahkan segala isi hati. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik saya.

13. Kepada Alief Dandy Syahnaufal, Tito Zulfahri, dan Anita serta seluruh teman-teman PYB untuk selalu memberikan dukungan terbaiknya kepada saya. Terima kasih untuk segala hiburan yang diberikan kepada saya.
14. Kepada Om Adi, Kak Tabita, Kak Iva, Kak Adel, Devi, dan Vanny. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, serta doa yang selalu diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada semua pihak yang turut memberikan dukungan dalam bentuk doa, semangat, serta nasihat kepada saya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan Penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	12
1.8 Metode Penelitian.....	12
1.8.1 Jenis Penelitian	12
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	13
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	14
1.8.4 Proses Penelitian.....	14
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB II	17
UPAYA INTERNASIONALISASI YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA KEPADA DUNIA INTERNASIONAL	17
2.1. Upaya Internasionalisasi kepada aktor negara	18
2.2 Upaya Internasionalisasi kepada aktor non-negara	29
BAB III	37

ANALISIS STRATEGI INTERNASIONALISASI ISU YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA DALAM USAHANYA MENDAPAT DUKUNGAN INTERNASIONAL TAHUN 2016-2020.....	37
3.1 Domestic Context Yang Dilakukan oleh ULMWP	40
3.2 Framing The Contention.....	46
3.3 Collective Action Form Antara OPM Dan Pendukungnya	57
BAB IV	65
PENUTUP.....	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Rekomendasi Penelitian.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Table 1- Upaya Internasionalisasi OPM kepada Aktor Negara	18
Table 2 - Upaya Internasionalisasi OPM Kepada Aktor Non-Negara	30
Table 3 - Indikator Externalisasi Isu oleh Sydney Tarrow	37
Table 4 - Upaya Domestic Context Untuk Menarik Dukungan Vanuatu	41
Table 5 - Upaya Framing The Contention OPM.....	47
Table 6 - Bentuk Kerja Sama Antara ULMWP dan Vanuatu	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Indonesia mencoba menghentikan dukungan dari Melanesia.....	48
Gambar 2 - Pemberitaan dari pemerintah Papua Barat	49
Gambar 3 - Propaganda terkait PT. Freeport.....	50
Gambar 4 - Wawancara antara CNN Indonesia dan OPM.....	51
Gambar 5 - Propaganda mengenai penanganan covid-19.....	52
Gambar 6 - Sinergitas TNI-Polri dalam penanganan covid-19.....	53
Gambar 7 - Klarifikasi Indonesia terkait propaganda OPM.....	54
Gambar 8 - Penahanan terhadap 245 tapol Papua	55
Gambar 9 - Respon Indonesia terkait tapol Papua	56
Gambar 10 - Sejumlah massa yang mengikuti gerakan sosial	58

DAFTAR SINGKATAN

OPM	: ORGANISASI PAPUA MERDEKA
DOM	: DAERAH OPERASI MILITER
AFC	: ACT of FREE CHOICE
PEPERA	: PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT
FLNKS	: FRONT de LIBERATION NATIONALE KANAK SOCIALISTE
HAM	: HAK ASASI MANUSIA
PBB	: PERSARIKATAN BANGSA-BANGSA
PKK	: PARTIYA KARKERAN KURDISTAN
GAM	: GERAKAN ACEH MERDEKA
NGO	: NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION
MSG	: MELANESIAN SPEARHEAD GROUP
ULMWP	: UNITED LIBERATION for WEST PAPUA
LSM	: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
PIF	: PACIFIC ISLAND FORUM
IPWP	: INTERNATIONAL PARLIAMENTARIANS for WEST PAPUA

ABSTRAK

Isu kemerdekaan Papua Barat menjadi sebuah persoalan yang hingga kini belum menemukan jalan keluar. Seiring berjalannya waktu, pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok pro-kemerdekaan seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak lagi hanya menggunakan kekerasan, melainkan menggunakan lobi-lobi politik dengan melakukan internasionalisasi isu untuk mendapatkan dukungan dari dunia Internasional. Strategi OPM dalam menarik dukungan masyarakat internasional kemudian sangat menarik untuk diteliti lebih jauh melalui kacamata Hubungan Internasional, khususnya terkait bagaimana strategi yang digunakan oleh OPM dalam menarik dukungan internasional untuk membantunya dalam mencapai kepentingannya, yaitu memisahkan diri dari NKRI. Penulis menggunakan teori *Externalizing The Contention* yang diperkenalkan oleh Sydney Tarrow untuk mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh OPM dalam menarik dukungan internasional.

Kata Kunci: Kelompok Separatis, OPM, Vanuatu, Internasionalisasi isu, *Externalizing The Contention*, Sydney Tarrow.

ABSTRACT

The issue of the independence of West Papua is a problem that has yet to find a solution. Over time, rebellions carried out by pro-independence groups such as the Free Papua Organization (OPM) no longer only use violence, but use political lobbies by internationalizing issues to gain support from the international community. The OPM strategy in attracting international community support is then very interesting to be studied further through the eyes of International Relations, especially regarding how the strategy used by OPM in attracting international support to assist it in achieving its interests, namely separating itself from the Unitary State of the Republic of Indonesia. The author uses the theory of Externalizing The Contention introduced by Sydney Tarrow to identify the strategies used by OPM in attracting international support.

Keywords : Separatist Group, OPM, Vanuatu, Internationalization of issues, Externalizing The Contention, Sydney Tarrow.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan sebuah gerakan separatis yang sudah ada sejak akhir tahun 60an. Sejarah integrasi masuknya Papua Barat ke Indonesia serta adanya eksploitasi sumber daya alam yang besar oleh pemerintah Indonesia namun hasilnya tidak dinikmati oleh masyarakat Papua itu sendiri dan Perhatian dari Pemerintah yang kurang kepada masyarakat Papua Barat menimbulkan kecemburuan di masyarakat yang kemudian kecemburuan inilah awal dari gerakan separatisme di Papua semakin besar. Lepasnya Timor-Timur dari Indonesia juga membangkitkan semangat OPM untuk semakin gerilya dalam melancarkan aksinya. Dukungan kepada OPM juga semakin bertambah ketika masyarakat asli Papua Barat menganggap apa yang dilakukan oleh OPM merupakan hal yang benar, yaitu memisahkan diri dari NKRI.

Perubahan masa Order Baru dan masuknya masa reformasi turut merubah dinamika penanganan OPM di Papua Barat. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah melakukan pendekatan represif dengan menjadikan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM) (Pulungan 2003). Sedangkan pada masa reformasi, pemerintah melakukan pendekatan dengan cara menarik simpati dari masyarakat Papua. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Presiden B.J Habibie adalah menghapus kebijakan DOM di Papua pada bulan Oktober 1998 (Pulungan 2003). Namun dengan berakhirnya masa Orde Baru dan memasuki masa Reformasi dianggap sebagai kesempatan oleh OPM dalam menyampaikan keinginannya untuk merdeka. Bahkan di bawah kepemimpinan Presiden B.J Habibie, bendera “bintang

kejora” dikibarkan di banyak titik. Salah satu tokoh penting dari Papua yaitu Tom Beanal secara terang terangan mengatakan kepada Presiden B.J Habibie saat diundang ke Istana untuk menyampaikan aspirasi, meminta Papua diberikan hak untuk merdeka. Pergantian kepemimpinan di Indonesia dari masa ke masa tidak menemukan titik terang masalah ini, gerakan OPM tetap ada hingga saat ini (Pulungan 2003). Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka telah lama menarik perhatian kalangan Internasional (komunitas Internasional), terlebih pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat untuk tetap menyatukan Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. Upaya yang terus dilakukan oleh OPM dalam menarik perhatian dunia adalah melalui kampanye internasional dan jalur diplomasi. Upaya internasionalisasi isu pelanggaran HAM di Papua dilakukan sejak tahun 1962 sebagai bentuk penolakan masyarakat *pro-merdeka* terhadap *New York Agreement* 1962 yang mengakui bahwa Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Elisabeth 2006). Gagasan untuk melakukan internasionalisasi Papua merupakan salah satu hasil dari Kongres Rakyat Papua II, dimana kongres tersebut menghasilkan sebuah pemikiran tentang upaya internasionalisasi Papua khususnya isu pelanggaran HAM dan kemerdekaan Papua merupakan hal yang harus dilakukan agar menarik simpati dari komunitas internasional sehingga dapat mempermudah tujuan mereka (Elisabeth 2006). Kini, aktivitas internasional OPM mengalami perkembangan, hal ini ditandai dengan berdirinya kantor sekretariat perlawanan baru di Den Haag, Belanda (Nainggolan 2014).

Semakin berkembang pesatnya teknologi, OPM pun kini menempuh jalur diplomasi dan propaganda dalam melakukan intrnasionalisasi isu. Lobi

internasionalisasi dilakukan oleh OPM melalui hubungan bilateral dan melalui pertemuan dalam forum-forum regional maupun internasional seperti PBB dan melalui *website* resminya, hal ini dilakukan guna untuk menarik simpatisan dan dukungan dari masyarakat Internasional (Deplu RI 2001). Dari berbagai cara yang telah dilakukan oleh OPM, berikut negara yang kemudian mendukung gerakan ini yaitu, Kepulauan Cook, Nauru, Tuvalu, dan Vanuatu (Elisabeth 2006). Vanuatu bersama dengan organisasi kawasan *Melanesia Spearhead Group* (MSG), seperti kepulauan Solomon dan Front Pembebasan Nasional Sosialis Kanak (Front de Liberation Nationale Kanak Socialiste -FLNKS) serius menanggapi dengan kritis terhadap isu tersebut (Elisabeth 2006). Terlihat di beberapa pertemuan internasional, Vanuatu sering menyampaikan keprihatinannya atas apa yang dialami oleh Papua di masa lalu serta menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah Indonesia yang harus bertanggung jawab mengenai pelanggaran HAM yang ditujukan kepada Papua di masa lalu, serta menuntut pembebasan Papua dari Indonesia.

Vanuatu merupakan sebuah negara kecil yang berada di sub Kawasan Melanesia di Kawasan Pasifik Selatan. Negara ini sejak tahun 2014 sering berbicara melalui perwakilannya mengenai pelanggaran HAM di Papua yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap masyarakat asli Papua, Vanuatu juga seringkali menunjukkan dukungannya agar Papua dapat merdeka dan terbebas dari kolonialisme Indonesia. Sejak tahun 2016, Vanuatu sering menunjukkan dukungannya terhadap Papua dalam berbagai pertemuan internasional, Vanuatu seringkali menyinggung mengenai isu pelanggaran HAM di Papua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di masa lalu, seruan kepada PBB untuk melakukan

penyelidikan terkait pelanggaran HAM di Papua, serta menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Papua. Sejak tahun 2016 hingga 2020 tercatat Negara Vanuatu telah lima kali berpidato di Majelis PBB dengan mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua. Kesamaan etnis ras Melanesia, isu kolonialisme, dan isu pelanggaran HAM menjadi alasan keaktifan negara Vanuatu dalam membahas isu pelanggaran HAM di Papua (Temaluru 2016)

Pemerintah Indonesia secara jelas mengatakan bahwa Papua merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hal tersebut sudah tertuang dalam resolusi PBB No. 2504 (XXIV) (Ruhaeni and Herayani 2017). Sejak tahun 2016, Pemerintah sering menerima ‘serangan’ dari negara Vanuatu di pertemuan Majelis PBB dengan mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas kasus pelanggaran HAM berat Papua di masa lalu serta menuntut pembebasan Papua dari Indonesia. Melalui perwakilannya di pertemuan Majelis PBB, Indonesia sering membalas tuduhan pelanggaran HAM yang disampaikan oleh Vanuatu. Pada tahun 2016 perwakilan diplomat Indonesia Nara Masista Rakhmatia menggunakan hak jawabnya di Majelis PBB untuk membantah semua tuduhan yang disampaikan oleh Vanuatu dan lima negara lainnya dengan mengatakan bahwa tuduhan yang disampaikan oleh Vanuatu dan kelima negara lainnya merupakan rancangan untuk mendukung gerakan separatisme di Papua dan Papua Barat. Kemudian pada tahun 2017 melalui diplomat muda Indonesia Ainan Nuran menggunakan hak jawabnya untuk membantah tuduhan Vanuatu dengan mengatakan bahwa Vanuatu mendukung gerakan separatisme Papua. Kemudian pada tahun 2018, Jusuf Kalla yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI secara

sah dan sudah sesuai hukum internasional, Jusuf Kalla juga mengatakan bahwa Vanuatu telah melanggar prinsip PBB, yaitu mengatakan isu yang tidak benar tentang pelanggaran HAM serta isu tidak sah nya Papua bergabung dengan Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2019 melalui diplomat muda Indonesia Rayyanul Sangadji menggunakan hak jawabnya untuk membantah semua tuduhan yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Vanuatu. Rayyanul Sangadji mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Vanuatu bukanlah bentuk kepeduliannya terhadap isu HAM, melainkan dukungan terhadap gerakan separatisme yang ada di Papua. Dan yang baru ini terjadi, Vanuatu kembali menyinggung isu HAM di Papua pada sidang Majelis PBB tahun 2020, melalui diplomat muda Indonesia Silvany Austin Pasaribu mengatakan bahwa Vanuatu memiliki obsesi yang besar terhadap pemerintahan Indonesia, dan obsesi ini bukanlah suatu hal yang baik. (CNN Indonesia 2020). Melihat peran dari masyarakat internasional seperti Vanuatu dan negara-negara di Kepulauan Pasifik lainnya yang aktif dalam membela isu HAM di Papua dan membela kemerdekaan Papua yang mana sejatinya merupakan *domestic matter*, maka penggalan terhadap strategi yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka dalam mendapatkan dukungan internasional sangat menarik untuk dikaji, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana strategi OPM dalam mendapatkan dukungan internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi Organisasi Papua Merdeka dalam memperoleh dukungan Internasional untuk memisahkan diri dari Indonesia Tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan rumusan masalah diatas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka dalam upaya untuk mencari dukungan dari dunia internasional
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk dukungan yang dilakukan oleh masyarakat internasional dalam membela Organisasi Papua Merdeka

1.4 Cakupan Penelitian

Cakupan dalam penelitian ini berfokus kepada upaya yang dilakukan oleh gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka dalam menarik simpati dunia Internasional dengan mengangkat isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, serta menarik dukungan masyarakat Internasional untuk mewujudkan tujuannya yaitu kemerdekaan Papua dan melepaskan diri dari bagian NKRI. Penelitian ini mengambil jangka waktu mulai dari tahun 2016 hingga 2020 dimana sejak saat itu negara Vanuatu bersama negara-negara di Kepulauan Pasifik lainnya sangat aktif dalam menyatakan dukungannya terhadap Papua di forum Internasional seperti Majelis Umum PBB, hal ini terlihat dari intensitas dukungan yang diberikan setiap tahunnya di Sidang PBB dan penggunaan diksi kata yang seringkali memojokkan Indonesia. Tidak hanya itu, pada tahun 2019, Vanuatu bahkan menyelundupkan Benny Wenda kedalam Delegasinya pada saat pertemuan kunjungan dengan KT HAM PBB. Strategi internasionalisasi yang dilakukan oleh para aktivis Organisasi Papua Merdeka seperti hubungan bilateral dan forum regional dan internasional mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Indonesia

dalam merespon dukungan Vanuatu. Penelitian ini menyempitkan fokus pada strategi yang dilakukan oleh gerakan separatis OPM dalam upaya untuk menarik simpati dan dukungan dunia internasional.

1.5 Tinjauan Pustaka

Agar lebih memahami dan mengetahui masalah yang dibahas pada penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka atau mereview kembali pustaka yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis berfokus kepada upaya Internasionalisasi yang dilakukan oleh gerakan separatisme di suatu negara agar mendapat dukungan baik dari Regional maupun Internasional.

Penelitian pertama yang ditinjau kembali adalah Jurnal yang berjudul “*Upaya Pemerintah Turki Dalam Mengatasi Gerakan Separatisme Suku Kurdi Tahun 1984-2007*” yang ditulis oleh Andina Sari Handayani dan Saiful Bachri pada tahun 2012 mengatakan bahwa konflik yang terjadi antara gerakan separatisme Partiya Karkeran Kurdistan (PKK) mendapat dukungan dari suku Kurdi dari negara-negara lain seperti Irak, Iran, dan Suriah. Dukungan ini berbentuk pemberian pasokan pangan, pengungsian, dan persenjataan bagi pasukan separatisme PKK. Hal ini dilakukan karena suku Kurdi di negara-negara tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mendirikan sebuah negara Kurdistan yang otonom.

Penelitian kedua yang ditinjau kembali yaitu skripsi yang berjudul “*Opsi Jalan Tengah Dalai Lama Dalam Penyelesaian Konflik China Tibet*” yang ditulis oleh Maya Hastuti Pada tahun 2011. Penelitian ini membahas mengenai gerakan separatisme di Tibet dan dukungan internasional yang didapatkan. Penelitian ini

kemudian menganalisis tentang peran Dalai Lama 14 sebagai tokoh spiritual Buddhis dan pemimpin politik di Tibet yang terkenal di kalangan Internasional dalam memberikan opsi jalan tengah terhadap Pemerintah China mengenai konflik yang terjadi. Penelitian ini menjelaskan bahwa banyaknya korban yang berjatuh akibat konflik yang berkepanjangan serta peran dari Dalai Lama sebagai sosok spiritual yang terkenal mengupayakan adanya upaya damai menimbulkan banyaknya simpati dari dunia Internasional.

Selanjutnya penelitian ketiga yang ditinjau kembali adalah jurnal yang membahas tentang gerakan separatisme di Aceh. Jurnal yang berjudul “*Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)*” membahas tentang bagaimana Gerakan Aceh Merdeka (GAM) membawa isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI pada masa Orde Baru ke dunia internasional guna untuk menarik simpati dari dunia Internasional. Dengan Internasionalisasi yang dilakukan oleh GAM dengan membawa isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru mengakibatkan banyaknya dukungan yang didapatkan oleh GAM dari dunia internasional salah satunya adalah *Amnesti Internasional*. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai peran dari pihak ketiga dalam membantu proses mediasi sebagai bentuk upaya penyelesaian konflik melalui jalur damai, seperti contoh kasus dalam penelitian ini Crisis Management Initiative yang merupakan NGO asal Finlandia yang bergerak dibidang penyelesaian konflik melalui dialog dan upaya mediasi.

Kemudian penelitian terakhir yang ditinjau kembali adalah jurnal yang berjudul “*Inkonsistensi Kebijakan Luar Negeri Melanesia Spearhead Group (MSG)*”

dalam Isu Papua Barat: Studi Kasus Fiji dan Papua Nugini” yang ditulis oleh Muhammad Fadhilah pada tahun 2019. Singkatnya, jurnal ini membahas mengenai peran Melanesia Spearhead Group dalam proses internasionalisasi yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam menganalisis mengenai isu pelanggaran HAM yang diangkat oleh gerakan separatis Papua Merdeka ke dunia Internasional, banyak negara yang kemudian memberikan perhatiannya terhadap isu tersebut salah satunya adalah Melanesia Spearhead Group yang memberikan perhatiannya terhadap Papua Barat berdasarkan visi utamanya yaitu dekolonisasi dan kebebasan di seluruh negara bangsa Melanesia dengan melakukan pendekatan melalui pengembangan identitas dan kebudayaan, politik, sosial, serta ekonomi masyarakat Melanesia (Fadhilah, 2019). Dukungan yang diberikan oleh MSG seperti tuduhan yang disampaikan pada saat pertemuan Dewan HAM PBB ke-37 pada tahun 2017.

Secara garis besar, penelitian sebelumnya berfokus kepada peran pihak ketiga dalam membantu gerakan separatis mencapai tujuannya, tokoh yang berperan penting dalam upaya jalur damai, serta peran dari pihak ketiga dalam penyelesaian konflik. Berangkat dari berbagai literatur yang telah ada, penulis berupaya untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan pembahasan yang berbeda, penulis ingin membahas mengenai analisis strategi yang dilakukan oleh gerakan separatisme Organisasi Papua Merdeka dalam upayanya untuk internasionalisasi. Penulis ingin mengetahui strategi apa saja yang dilakukan oleh gerakan separatisme di suatu negara dalam mencari perhatian dari dunia Internasional.

1.6 Kerangka Pemikiran

Terdapat banyak fenomena gerakan separatisme terjadi di dunia yang hingga saat ini masih menjadi sebuah permasalahan yang belum berakhir. Dalam berupaya untuk menganalisis fenomena dan masalah tersebut, para peneliti menggunakan teori-teori yang ada dalam prosesnya. Terdapat banyak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dalam menganalisis gerakan-gerakan separatis di suatu negara. Adapun dalam penelitian ini, Penulis menggunakan model *Externalizing the Contention* yang diperkenalkan oleh Sidney Tarrow (Tarrow, *Externalizing Contention* 2005).

Externalizing the Contention merupakan upaya yang sering dilakukan oleh kelompok gerakan separatisme dalam mencari dukungan dari negara-negara lain maupun lembaga internasional dalam mencapai tujuannya. Eksternalisasi isu domestik mengenai apa saja yang telah mereka alami merupakan cara yang paling sering dilakukan untuk menarik dukungan internasional. Isu yang paling sering diangkat oleh kelompok separatis adalah isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah di negaranya dan isu mengenai ketidakadilan yang mereka rasakan. Menurut Tarrow, eksternalisasi isu domestik yang dilakukan oleh aktor domestik merupakan bentuk dari ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan ganti rugi dari pemerintah di negaranya, sehingga mereka mencari dukungan dari negara lain untuk membantu mencapai tujuannya (Tarrow, *Externalizing Contention* 2005).

Menurut Tarrow, aktivis gerakan separatisme lokal seringkali menggunakan strategi eksternalisasi dalam upayanya mencari atensi dari dunia internasional disaat pemerintah di negaranya tidak memberikan respon sesuai dengan apa yang

mereka inginkan. Menurut Tarrow, Eksternalisasi isu ini dilakukan dengan tiga cara ; yang pertama menyebarkan informasi mengenai *domestic context*, hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi mengenai keadaan domestik, kemudian disebar. Adapun isu yang selalu diangkat adalah (1) mengenai tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah kepada kelompok separatis, (2) mengangkat isu pelanggaran HAM, (3) menyebarkan isu mengenai ketidakadilan yang mereka dapatkan serta pemerintah yang lamban dalam menanggapi keinginan mereka. Yang kedua melakukan upaya *framing contention*, yaitu upaya untuk mencari atensi dengan melakukan tindakan *framing*, seperti manipulasi informasi atau manipulasi cerita tentang kejadian-kejadian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap mereka, mengemas cerita seperti tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan, adanya ketidakadilan yang diberikan oleh pemerintah, serta yang paling sering dilakukan oleh aktivis separatisme adalah mengangkat isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah di negaranya untuk mendapatkan dukungan dari negara lain, karena mereka tahu bahwa isu mengenai pelanggaran HAM merupakan isu yang akan sangat cepat dalam membantu mereka mendapatkan dukungan. Yang ketiga, setelah menyebarkan informasi yang telah dikemas oleh para aktivis separatisme diterima oleh negara-negara lain atau bahkan lembaga internasional dan kemudian negara lain dan lembaga internasional itu mendukung kelompok tersebut, maka mereka melakukan *collective action form* atau melakukan kerjasama antara kelompok separatis dengan negara-negara atau lembaga internasional yang memberikan dukungan terhadap gerakan mereka.

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis terkait upaya hingga keberhasilan gerakan separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam internasionalisasi isu domestik yang dilakukan dalam upayanya untuk mencari dukungan dari negara-negara dan lembaga internasional seperti Vanuatu yang sejak tahun 2016 secara vokal menyuarakan mengenai isu pelanggaran HAM yang telah dilakukan pemerintah Indonesia di masa lalu terhadap masyarakat asli Papua serta mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia.

1.7 Argumen Sementara

Dapat disimpulkan sementara bahwa terdapat tiga isu utama yang selalu dibawa oleh OPM dalam upayanya melakukan internasionalisasi isu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional, antara lain (1) membawa isu pelanggaran HAM, (2) memposisikan diri sebagai negara yang terjajah dan (3) membawa isu kesamaan Ras Melanesia untuk menarik perhatian khusus dari negara-negara dikawasan Pasifik Selatan. Upaya internasionalisasi ini dilakukan dengan melakukan lobi-lobi politik seperti kunjungan untuk membahas isu Papua Barat, melakukan wawancara dengan berbagai media, menjadi narasumber disebuah acara, hingga menggunakan *website* untuk menyampaikan propaganda terkait isu Papua Barat. Upaya internasionalisasi isu melalui lobi-lobi politik ini kemudian berhasil menarik dukungan dari masyarakat internasional.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif merupakan metode yang paling umum digunakan dalam melakukan penelitian sosial. Metode kualitatif dipengaruhi oleh paradigma naturalistik-interpretatif weberian (G. R. Somantri 2005). Bentuk dari metode kualitatif dipengaruhi oleh gaya yang berusaha mengkonstruksi realita dan mencoba untuk memahami makna dibaliknya, oleh karena itu metode kualitatif sangat memperhatikan peristiwa dan proses yang terjadi. Dalam metode kualitatif, peneliti melibatkan sedikit subjek dan bersifat eksplisit yang terbatas, oleh karena itu metode kualitatif sangat berfokus kepada analisis tematik (G. R. Somantri 2005). Pendekatan deskriptif digunakan sebagai upaya dalam menguraikan dan menyesuaikan dengan hasil data-data yang ada di dalam penelitian ini.

Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif sebagai dasar dalam membantu menjelaskan hasil data dan fakta yang berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh gerakan separatisme Organisasi Papua Merdeka dalam upayanya untuk mencari dukungan dari dunia internasional khususnya negara Vanuatu pada tahun 2016-2020.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka. Dan Objek pada penelitian ini adalah upaya-upaya internasionalisasi apa saja yang dilakukan oleh OPM dalam upayanya untuk mencari dukungan dari internasional.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data, Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder sebagai acuan dalam penelitian ini. Data tersebut bersumber dari jurnal, artikel, buku, serta berita online yang terpercaya.

1.8.4 Proses Penelitian

1. Mencari Sumber Data

Pada tahap ini, penulis mencari sumber data atau informasi yang berkaitan secara langsung dan relevan dengan tema penelitian yang sedang dibahas. Sumber data atau informasi ini diambil dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel, dan berita online yang terpercaya.

2. Mengumpulkan dan Menganalisis Data

Setelah menemukan sumber data atau informasi yang relevan dengan tema penelitian, penulis kemudian mengumpulkan data-data tersebut. Selanjutnya, penulis menganalisis data yang didapat, hal ini dilakukan agar penulis dapat membandingkan data-data yang ada sehingga lebih memahami isu yang sedang dibahas.

3. Menulis Literatur

Setelah melakukan pencarian data dan menganalisis data-data yang didapat, penulis kemudian menuliskannya di dalam penelitian. Dalam proses penulisan penelitian, penulis akan mengacu kepada

sumber data yang telah didapatkan kemudian dielaborasi menjadi sebuah pembahasan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengikuti seluruh bagian pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : UPAYA INTERNASIONALISASI YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA KEPADA DUNIA INTERNASIONAL

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai upaya dari internasionalisasi yang dilakukan oleh OPM kepada dunia internasional, baik itu aktor negara maupun aktor non-negara.

BAB III : ANALISIS STRATEGI INTERNASIONALISASI ISU YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA DALAM USAHANYA MENDAPAT DUKUNGAN DARI INTERNASIONAL TAHUN 2016-2020

Pada bab ini, penulis menjelaskan terkait analisis strategi yang digunakan oleh OPM dalam upayanya untuk menarik dukungan dari internasional

menggunakan teori Externalizing The Contention yang diperkenalkan oleh Sydney Tarrow.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini, penulis menuliskan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan oleh penulis.

BAB II

UPAYA INTERNASIONALISASI YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA KEPADA DUNIA INTERNASIONAL

Organisasi Papua Merdeka (OPM) secara aktif menyuarakan kampanye pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah sejak tahun 1963 dimana Indonesia berhasil merebut wilayah Papua dari pemerintahan Belanda. Pemberontakan-pemberontakan awal yang dilakukan oleh OPM menimbulkan adanya reaksi dari Pemerintah Indonesia, salah satunya adalah melalui operasi-operasi militer yang menimbulkan banyak korban jiwa. Reaksi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh OPM dalam melancarkan aksi propagandanya untuk menarik perhatian dunia internasional. Gagasan untuk melakukan Internasionalisasi isu ada sejak terjadinya Kongres Rakyat Papua II. Dalam kongres tersebut menghasilkan dua keputusan, yang pertama adalah membentuk sebuah tim yang bertugas untuk melakukan lobi-lobi internasional salah satunya adalah meminta dukungan dari Dewan Keamanan PBB, selanjutnya adalah meminta Presidium Dewan Papua (PDP) untuk melakukan dialog-dialog dengan Belanda, Amerika Serikat, Indonesia dan PBB (Elisabeth 2006).. Lobi-lobi internasional dilakukan OPM secara bilateral dengan Organisasi Internasional atau LSM dan negara. Lobi-lobi secara bilateral ini kemudian akan dilanjutkan di forum-forum internasional seperti Majelis Umum PBB dan Forum Negara Pasifik (Elisabeth 2006).. Hal ini dianggap sebagai bentuk dukungan internasional atas kasus yang sedang terjadi di Papua. Isu yang selalu dibahas adalah terkait sejarah Papua, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap masyarakat Papua, rasa tidak adil yang dialami oleh masyarakat papua disektor ekonomi dan sosial, serta adanya bentuk

diskriminasi RAS yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Terdapat dua hal yang menjadi target utama OPM dalam melakukan lobi-lobi bilateral guna untuk menyampaikan propagandanya, yaitu dengan aktor negara dan aktor non-negara.

2.1. Upaya Internasionalisasi kepada aktor negara

Sejak pemimpin Gerakan separatis Organisasi Papua Merdek (OPM) secara resmi dihapus dari daftar *Red Notice* Interpol pada tahun 2012, OPM secara aktif dan terang-terangan melanjutkan kegiatan lobi-lobi internasionalnya ke berbagai negara seperti Inggris, Selandia Baru, Australia, hingga Amerika Serikat (Bonasir 2013). Terdapat enam upaya yang dilakukan oleh OPM untuk membawa isu pelanggaran HAM di Papua Barat ke dunia Internasional mulai dari tahun 2016 hingga 2020, secara ringkas diuraikan dalam tabel berikut:

Table 1- Upaya Internasionalisasi OPM kepada Aktor Negara

Negara Tujuan	Waktu	Kanal	Instrumen	Upaya yang dilakukan
Tonga, Vanuatu, Papua Nugini Kepulauan Solomon, Inggris, Australia, Belgia, New Zealand, dan Guyana	3 Mei 2016	Negara (kelompok)	Pertemuan	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat. Pertemuan ini membahas mengenai isu politik seputar Papua Barat dan perencanaan strategi terkait referendum kemerdekaan Papua Barat yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2020. - Pembentukan Deklarasi Westminster. Deklarasi Westminster secara resmi dibentuk dalam pertemuan tersebut untuk

				mendukung penentuan nasib rakyat Papua Barat.
Inggris	- 7 September 2017 - 27 Februari 2020	Partai Politik/ Parlemen	Pertemuan	- Pemaparan hasil referendum kepada Ketua Partai Buruh dan Ketua Pihak Oposisi Inggris, Jeremy Corbin. - Mengundang Anggota Parlemen Inggris untuk menghadiri pertemuan parlemen OPM di Inggris.
Selandia Baru	10 Mei 2017	Negara	Pertemuan	Peluncuran deklarasi <i>Westminster</i> untuk Papua Barat di parlemen Aotearoa, Selandia Baru.
Pacific Island Forum (PIF)	- 28 Agustus 2018 - 9 September 2017	Negara (Kelompok)	Pertemuan	- Seruan yang dilakukan oleh OPM kepada Pacific Island Forum (PIF) untuk membawa kasus Papua Barat ke Majelis Umum PBB. - Meminta dukungan kepada PIF untuk mendukung penentuan nasib sendiri OPM.
Vanuatu	28 Januari 2019	PBB	Petisi/Referendum	Penyerahan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet.
Dunia Internasional	2016 – 2020	Media Massa	Website	Pembuatan <i>framing</i> mengenai pemberitaan terkait pelanggaran HAM di Papua Barat, aktivitas yang dilakukan oleh OPM, hingga embagaa yang dilakukan antara OPM dan pihak-pihak yang memberikan dukungannya. - Bennywenda.org - Freewestpapua.org

Kenya	9-10 Desember 2019	Negara (Kelompok)	Pertemuan	OPM bergabung dengan delegasi Vanuatu mendatangi Konferensi Tingkat Tinggi Afrika, Karibia, dan Pasifik (ACP) ke-9, dengan tujuan untuk meminta dukungan atas hak menentukan nasib sendiri bagi Papua Barat.
Belanda	10 Maret 2019	Negara	Aksi protes	Melakukan penyelundupan sebuah aksi protes lingkungan #ClimateMarch dengan mengangkat isu Papua Merdeka.
Kepulauan Solomon	19 Maret 2020	Negara	Pertemuan	Melakukan pertemuan dengan ketua oposisi Partai Demokrat Solomon, Hon. Matthew Cooper Wale guna untuk mendapatkan kepercayaan dari anggota MSG dengan harapan ingin menjadi anggota tetap MSG.

Sumber: diolah dari BBC News Indonesia dan Website Bennywenda.org dan Freewestpapua.org.

Adapun upaya-upaya internasionalisasi yang dilakukan oleh OPM kepada aktor negara diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat digelar di London pada tanggal 03 Mei 2016. Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa pemimpin dari negara Kepulauan Pasifik seperti Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva, Menteri Pertanian Vanuatu, Ralph Regenvanu, serta ketua dari OPM, Benny Wenda. Pertemuan ini membahas mengenai isu politik seputar Papua Barat dan perencanaan strategi terkait referendum kemerdekaan Papua Barat yang rencananya

akan dilaksanakan pada tahun 2020 (BBC News Indonesia 2016). Pertemuan ini kemudian dianggap sebagai embaga baik bagi OPM, karena mereka beranggapan bahwa banyak negara yang kemudian mendukung terjadinya referendum untuk Papua Barat dan memberikan hak hukum bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.

Pembentukan Deklarasi *Westminster* pada 3 Mei 2016 di London, Inggris dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara dan tokoh penting seperti Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva, Menteri Pertanian Vanuatu, Ralph Regenvanu, Ketua dari OPM dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) serta Ketua Partai Buruh dan Ketua Pihak Oposisi Inggris, Jeremy Corbin. Deklarasi Westminster secara resmi dibentuk dalam pertemuan tersebut untuk mendukung penentuan nasib rakyat Papua Barat.

2. Pada tahun 2017, Benny Wenda mengatakan bahwa akan memulai untuk melakukan pengisian petisi referendum kemerdekaan Papua Barat, dan pada tanggal 07 September 2017, Benny Wenda menampilkan petisi ini kepada Ketua Partai Buruh dan Ketua Pihak Oposisi Inggris, Jeremy Corbin. Dalam pertemuan tersebut, Benny Wenda juga mengatakan bahwa petisi referendum tersebut telah ditandatangani oleh masyarakat Papua Barat sebanyak lebih dari 1,8 Juta orang jiwa. Benny Wenda juga mengatakan bahwa petisi ini merupakan upaya dari lebih dari setengah masyarakat Papua Barat yang mengharapkan adanya kemerdekaan bagi Papua Barat. Hubungan antara Benny Wenda dan Jeremy Corbin telah lama terjalin,

Jeremy Corbin memang selalu menunjukkan dukungannya terhadap OPM, salah satunya adalah kehadiran Jeremy Corbin pada deklarasi Westminster pada Mei 2016.

OPM mengundang anggota parlemen Inggris di London untuk menghadiri pertemuan yang bertemakan ‘The West Papua Uprising: Where Next?’. Pertemuan ini dipimpin oleh Alex Sobel MP pada 23 Maret 2020 pukul 15.00 di Jubilee Room. Benny Wenda akan menghadiri pertemuan ini sebagai pembicara (Office of Benny Wenda 2020).

3. Setelah memeperlihatkan deklarasi *Westminster* kepada Jeremy Corbin, Benny Wenda yang merupakan ketua dari International Parliamentarians for West Papua (IPWP) meluncurkan deklarasi Westminster untuk West Papua di parlemen Aotearoa Selandia Baru pada 10 Mei 2017 (Office Of Benny Wenda 2017). Deklarasi Westminster diluncurkan untuk mengawasi suara secara internasional di Papua Barat. Deklarasi tersebut disepakati dan ditandatangani oleh anggota parlemen Selandia Baru Aotearoa. Deklarasi ini diluncurkan untuk menegaskan bahwa adanya hak secara hukum bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri. Adapun isi dari Deklarasi Westminster adalah :

Kami Anggota Parlemen Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

1. Menyatakan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terus terjadi di Papua Barat tidak dapat diterima.

2. Memperingatkan bahwa tanpa tindakan internasional, rakyat Papua Barat terancam akan punah.
3. Menegaskan kembali hak masyarakat Papua Barat atas hak menentukan nasib sendiri.
4. Menyatakan '*act of free choice*' tahun 1969 sebagai pelanggaran berat atas prinsip ini.
5. Menyerukan pemungutan suara yang akan diawasi secara internasional tentang penentuan nasib sendiri sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB 1514 dan 1541 (XV).

Pertemuan ini dianggap sebagai sebuah pencapaian besar bagi IPWP, dimana pada tahun 2013 Parlemen Selandia Baru melarang Benny Wenda untuk menyampaikan aspirasinya di parlemen karena dikhawatirkan akan mengganggu hubungan bilateral antara Selandia Baru dan Indonesia, namun kini Benny Wenda diberikan kesempatan berbicara dengan bebas di Parlemen, hal ini kemudian memberikan harapan besar bagi IPWP untuk mendukung mereka dalam melakukan internasionalisasi isu dengan menggandeng pembuat kebijakan di sebuah negara agar membantu mereka mencapai kepentingan mereka, yaitu melepaskan diri dari NKRI.

4. Seruan yang dilakukan oleh OPM kepada Pacific Island Forum (PIF) untuk membawa kasus Papua Barat ke Majelis Umum PBB. Pada Agustus 2018, para pemuda yang diklaim oleh OPM merupakan kelompok pemuda yang berasal dari Papua Barat melakukan aksi seruan yang mengajak PIF untuk menjadikan isu Papua Barat sebagai

isu utama yang akan dibahas pada pertemuan para pemimpin PIF regional pada 1 hingga 9 September di Nauru. Seruan ini juga meminta kepada para pemimpin PIF untuk membawa isu Papua Barat ke Majelis Umum PBB agar mereka mendapatkan hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Aksi tersebut juga menyebutkan bahwa dibawah kependudukan Indonesia, setidaknya terdapat lebih dari 500.00 masyarakat Papua Barat yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Militer Indonesia.

Selain meminta dukungan untuk membawa masalah Papua Barat ke Majelis Umum PBB, OPM juga selalu meminta dukungan kepada PIF untuk menjadikan Masalah Papua Barat adalah masalah utama, hal ini kemudian ditunjukkan dengan OPM meminta kepada PIF untuk terus memberikan dukungan kepada Papua atas hak untuk menentukan nasib sendiri. Salah satunya dilakukan oleh OPM pada tanggal 09 September 2017 melalui *website* resmi OPM yaitu bennywenda.org, OPM menyatakan seruannya kepada PIF untuk terus memberikan dukungannya kepada Papua Barat atas hak penentuan nasib sendiri.

5. Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2019, Pemimpin OPM, Benny Wenda menyerahkan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang di klaim telah ditandatangani sebanyak 1,8 juta masyarakat Papua. Kemudian referendum ini diserahkan oleh Benny Wenda kepada Ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet. Penyerahan petisi tersebut dilakukan oleh OPM yang diwakilkan oleh Benny Wenda. OPM melakukan penyusupan

dengan bergabung bersama delegasi dari Vanuatu ketika Bachelet bertemu dengan delegasi dari Vanuatu dalam sesi Ulasan Universal Periodik Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Hal ini menimbulkan respon dari Indonesia yang kemudian mengatakan bahwa Vanuatu menyelundupkan Benny Wenda ke PBB.

6. Upaya menarik dukungan masyarakat Internasional melalui pembentukan *framing* di *website* resmi OPM, yaitu Bennywenda.org dan Freewestpapua.org. Kedua *website* ini secara garis besar menyajikan berita mengenai aktivitas yang dilakukan oleh OPM. Adapun aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh OPM melalui *website* resminya antara lain :

- Bennywenda.org

Bennywenda.org merupakan sebuah *website* yang bernama *Office Of Benny Wenda*. *Website* ini berlokasi di Oxford, Inggris. *Website* ini menjelaskan berbagai hal mulai dari biografi dari Benny Wenda sebagai ketua dari pergerakan kemerdekaan Papua Barat, upaya yang dilakukan oleh Benny Wenda untuk melakukan internasionalisasi isu seperti free west papua champaign, political lobbying, international lobbying, documentary, dan berita-berita yang berisikan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Benny Wenda, terkait Kerjasama bilateral antara OPM dan berbagai pihak, ajakan dan seruan untuk mendukung OPM, dan pemberitaan terkait

pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua.

- Freewestpapua.org

Free West Papua Campaign merupakan sebuah *website* yang terbentuk pada tahun 2004 di Oxford, Inggris dibawah kepemimpinan Benny Wenda sebagai ketua dari Organisasi Papua Merdeka atau *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP). Tujuan dari *website* ini adalah untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat Papua Barat untuk memilih nasibnya sendiri melalui referendum yang adil dan transparan. *Website* ini juga membuka donasi dan melakukan penjualan seperti baju yang bertuliskan *Free West Papua*, bendera Papua Barat, dan lainnya. *Website* ini sendiri memiliki fokus utama untuk menyampaikan propaganda terkait kondisi yang terjadi di Papua Barat dan Pelanggaran HAM yang diterima oleh masyarakat Papua yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia serta ajakan untuk mendukung Gerakan Papua Merdeka.

Dalam menyampaikan berita di websitenya, terdapat perbedaan narasi yang disampaikan oleh *website* resmi OPM dengan berita media internasional, dalam hal ini CNN Indonesia. Pada 29 Januari 2019, *website* freewestpapua.org membagikan berita yang mengatakan bahwa Komisioner Dewan HAM PBB, Michelle Bachelete telah menerima dengan

baik petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaim telah ditandatangani oleh lebih dari 1,8 juta jiwa. Namun hal ini jelas berbeda dari apa yang diberitakan oleh CNN Indonesia yang mengatakan bahwa Michelle Bachelete secara tegas mengatakan tidak akan menangani petisi referendum kemerdekaan yang diserahkan kepadanya pada 25 Januari lalu. Alasannya adalah karena Bachelete beranggapan bahwa Dewan HAM tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindak lanjut atas petisi yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan HAM. Bachelete juga mengatakan bahwa petisi referendum itu bersifat politik, bukan HAM oleh karena itu tidak akan ditindaklanjuti oleh Dewan HAM PBB (CNN Indonesia 2020).

Website freewestpapua.org seringkali menunjukkan kedekatannya dengan negara pendukungnya, yaitu Vanuatu, dalam hal ini OPM melalui website resminya menyatakan selamat hari kemerdekaan yang ke-38 kepada Vanuatu. Ini merupakan upaya dari OPM untuk terus mempertahankan hubungan bilateralnya dengan negara pendukung terbesarnya.

ULMWP atau OPM seringkali mencari dukungan dan menggalang dukungan dunia internasional melalui *website* resminya. Seperti contoh, ULMWP mengajak Forum Kepulauan Pasifik (PIF) untuk mendukung penentuan nasib sendiri Papua Barat. Mereka juga mengajak Forum Kepulauan

Pasifik untuk menjadikan isu Papua Barat sebagai isu utama yang akan dibawa ke pertemuan Majelis Umum PBB.

7. Kenya

Pada tanggal 9 dan 10 Desember 2019, OPM dibawah pimpinan Benny Wenda bergabung dengan delegasi dari Vanuatu menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Afrika, Karibia, dan Pasifik (ACP) yang ke-9 dengan tujuan untuk meminta dukungan dari negara-negara yang hadir atas hak menentukan nasib sendiri kemerdekaan Papua Barat. Dalam pertemuan tersebut, Daniel Mwambonu, selaku ketua Global Pan Africanism Network (GPAN) menyambut baik hadirnya Benny Wenda dengan isu yang dibawanya. Dukungan atas OPM juga diberikan oleh Daniel Mwambonu yang kemudian membantu OPM membuka kantor ULMWP di Kenya.

8. Belanda

Pada 10 Maret 2019, OPM melalui seorang perwakilannya yang berbasis di Belanda, Raki Ap melakukan penyelundupan isu Papua Merdeka di sebuah aksi protes lingkungan #CilmateMarch dengan melakukan pembajakan atau pengambil alihan masa aksi protes, dan kemudian melakukan kampanye isu Papua merdeka. Penyusupan ini kemudian berhasil menarik simpati dan ekspos dari masyarakat Belanda terhadap isu Papua Merdeka.

9. Kepulauan Solomon

Pada tanggal 19 Maret 2020, kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka melalui perwakilannya, Jacob Rumbiak melakukan pertemuan dengan ketua oposisi Partai Demokrat Kepulauan Solomon, Hon. Matthew Cooper Wale. Dalam pertemuan ini, OPM menyampaikan bahwa isu Papua adalah isu yang harus diperhatikan, Indonesia telah lama menjajah Papua Barat dan melakukan banyak pelanggaran HAM. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah upaya OPM untuk mendapatkan kepercayaan dari Kepulauan Solomon sebagai salah satu anggota dari Melanesian Spearhead Group (MSG) dengan harapan agar OPM dapat dipercaya untuk menjadi anggota tetap MSG.

2.2 Upaya Internasionalisasi kepada aktor non-negara

Dalam melakukan upaya internasionalisasi, OPM secara aktif menyebarkan propaganda terkait isu pelanggaran HAM di Papua Barat kepada dunia, khususnya melalui *website* resminya yaitu *freewestpapua.org* dan *bennywenda.org*. Hal ini kemudian mengundang banyak simpati dari dunia internasional yang tidak hanya datang dari negara, melainkan media, organisasi, dan embaga yang ada di regional hingga internasional. aktor non-negara seperti inilah yang memberikan bantuan secara signifikan bagi upaya internasionalisasi isu yang dilakukan oleh OPM, seperti contohnya media yang kemudian memberikan pemberitaan terkait apa yang terjadi di Papua Barat, yang kemudian semakin menarik simpati dari dunia internasional. Terdapat

lima upaya internasionalisasi yang dilakukan oleh OPM kepada aktor non-negara antara lain :

Table 2 - Upaya Internasionalisasi OPM Kepada Aktor Non-Negara

Aktor yang dituju	Waktu	Kanal	Instrumen	Upaya Internasionalisasi
Media Massa : Media <i>Sydney Criminal Lawyers</i> .	08 November 2018	Media Massa	Interview	Melakukan sesi wawancara dengan media <i>Sydney Criminal Lawyers</i> membahas terkait petisi referendum kemerdekaan Papua Barat.
Organisasi Internasional : <i>The Pacific Islands Association of Non-government Organisations</i> (PIANGO).	03 Maret 2017	PBB	Pertemuan	Menghadiri Sidang umum ke-34 Dewan Hak Asasi Manusia PBB guna untuk mendengarkan dukungan dari negara Vanuatu dan negara Kepulauan Pasifik untuk OPM terkait Pelanggaran HAM di Papua.
Organnisasi Internasional : Amnesty Internasional	-	Media Massa	Website Resmi OPM (Bennywenda.org dan Freewestpapua.org)	Pembuatan framing berita mengenai kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia kepada rakyat Papua Barat.
Forum Asia	-	Media Massa	Website Resmi OPM (Bennywenda.org dan Freewestpapua.org)	Pembuatan framing berita mengenai kasus pelanggaran HAM.
Caritas Australia	-	Media Massa	Website Resmi OPM (Bennywenda.org dan Freewestpapua.org)	Pembuatan framing berita mengenai kasus pelanggaran HAM.

Sumber : Diolah dari Media *Sydney Criminal Lawyers*, Website *Freewestpapua.org* dan *Bennywenda.org*.

Adapun upaya-upaya internasionalisasi yang dilakukan oleh OPM kepada aktor non-negara diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Media Massa

Di era saat ini media memiliki peranan yang sangat penting dalam proses internasionalisasi isu. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh OPM dalam melakukan internasionalisasi isu adalah melalui media massa, pembuatan *framing* cerita yang dramatis yang kemudian menarik simpati bagi pembacanya. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh OPM untuk membantu mereka dalam melakukan internasionalisasi isu terkait pelanggaran HAM agar dapat dukungan dari dunia internasional. OPM sendiri tercatat memiliki dua *website* yang khusus berisikan terkait berita-berita baik mengenai lobi-lobi internasionalnya hingga berita terkait pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua Barat. Selain itu, terdapat pula media massa yang kerap membentuk framing pemberitaan mengenai masyarakat Papua Barat menjadi isu sosial, yaitu :

1. Media Sydney Criminal Lawyers

Pada tanggal 08 November 2018, ketua OPM dan ULMWP, Benny Wenda melangsungkan wawancara dengan media Sydney Criminal Lawyer membahas terkait petisi referendum kemerdekaan Papua Barat. Dalam penulisan beritanya, media Sydney Criminal Lawyers mengajak pembaca untuk memperhatikan masyarakat Papua Barat dengan mengatakan ‘Time To Support West Papua: An Interview with Independence Leader Benny Wenda’. Media ini menyatakan bahwa pada tanggal 26 September 2017, Benny Wenda telah menyerahkan

petisi referendum kepada PBB. Media ini menceritakan bahwa Indonesia melarang keras pengisian petisi tersebut, Indonesia juga memberikan ancaman penangkapan dan pemenjaraan bagi siapa saja yang mengisi petisi tersebut. Media tersebut juga menjelaskan terkait sejarah kependudukan Indonesia atas Papua hingga runtuhnya korban jiwa sebanyak 500.000 yang dilakukan oleh militer dari Indonesia (Gregoire 2017). Adanya bantuan dari media asing dalam proses internasionalisasi isu yang dilakukan oleh OPM tentu saja memberikan keuntungan yang besar bagi OPM untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari dunia Internasional.

2. Organisasi Internasional

Organisasi Internasional merupakan target selanjutnya dari upaya internasionalisasi isu yang dilakukan oleh OPM, khususnya adalah Organisasi Internasional yang bergerak dibidang penanganan HAM dan isu sosial. Terdapat beberapa Organisasi Internasional yang menjadi salah satu tempat dimana OPM melakukan lobi-lobi propagandanya untuk mencari dukungan, yaitu :

- *The Pacific Islands Association of Non-government Organisations (PIANGO)*. Pada tanggal 3 Maret 2017, website resmi OPM yaitu bennywenda.org memberitakan bahwa ketua OPM, Benny Wenda, Sekretaris Jenderal, Octovianus Mote, dan beberapa anggota dari ULMWP sedang berada di Jenewa untuk

menghadiri Sidang ke-34 Dewan Hak Asasi Manusia PBB. ULMWP tidak datang sendiri, melainkan bersama dengan *The Pacific Islands Association of Non-government Organisations (PIANGO)*. Dalam kesempatan itu, Menteri Kehakiman dan Pengembangan Masyarakat Vanuatu, Hon. Ronald Warsal Kalmasei mengatakan dalam pidatonya kepada Dewan HAM PBB mengenai kekerasan dan pelanggaran HAM berat terhadap masyarakat Papua Barat oleh Pemerintah Indonesia. Dalam website tersebut, Benny Wenda mengucapkan banyak terima kasih kepada Vanuatu dan lima negara kepulauan pasifik lainnya atas dukungan nyata yang selalu diberikan kepada OPM. PIANGO merupakan organisasi non pemerintahan yang mendukung OPM dalam usahanya menyampaikan aspirasinya ke forum PBB.

3. Amnesty Internasional

Mudahnya dalam mengakses berita melalui media massa yang ada, serta banyaknya media yang memberitakan terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat, hingga propaganda yang dilakukan oleh OPM itu sendiri, akhirnya menarik perhatian dari Organisasi Internasional yang bergerak dibidang Hak Asasi Manusia dan isu sosial, yaitu Amnesty Internasional. Amnesty Internasional seringkali memberikan dukungannya melalui pernyataan-pernyataan resminya seperti mendesak pembentukan komisi kebenaran di Papua dan

mendesak Pemerintah Indonesia membebaskan aktivis yang ditangkap ketika melakukan demonstrasi. Amnesty Internasional berfokus kepada perlakuan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua Barat, baik itu aktivis hingga warga sipil biasa. Banyaknya korban jiwa yang timbul juga menjadi fokus utama dari Amnesty Internasional mendesak Indonesia untuk bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat.

4. Forum Asia

Semakin maraknya isu kekerasan terhadap rakyat Papua Barat beredar di media massa baik regional maupun internasional, mengundang banyaknya simpatisan yang datang, khususnya dari organisasi HAM regional. Forum Asia merupakan organisasi regional yang berpusat di Bangkok, Thailand. Forum ini menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai fokus utamanya. Organisasi ini merupakan bentukan dari hasil keputusan pertemuan organisasi HAM di Asia pada tahun 1992. Forum Asia didirikan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan pelanggaran HAM yang ada di Asia, selain itu forum ini juga menjadi wadah bagi masyarakat Asia untuk melakukan kajian terkait perkembangan HAM di wilayah Asia. Isu HAM Papua Barat merupakan isu utama yang menjadi perhatian dari forum ini (Elisabeth 2006).

5. Caritas Australia

Lembaga Internasional selanjutnya yang memberikan dukungannya kepada rakyat Papua Barat terkait isu pelanggaran HAM di Papua adalah *Caritas Australia atau The Catholic Agency for Overseas Aid and Development*. *Caritas Australia* merupakan sebuah lembaga bantuan pengembangan manusia yang dikelola oleh Gereja Katholik di Australia. Lembaga ini didirikan dilatarbelakangi oleh prinsip kebebasan bagi setiap individu. Lembaga kemanusiaan ini telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 150 organisasi yang berada di berbagai negara. Dalam menjalankan program pembangunan kemanusiaannya di Papua, *Caritas Australia* memfokuskan diri kepada sektor kesehatan, pendidikan, keagamaan, upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan, serta pelatihan dibidang pertanian. Di Papua, *Caritas* melakukan kegiatan *workshop* yang bertajuk *Peace Building and Development in West Papua* “Menjawab Kekerasan di Papua Barat: Dengar Pendapat Dengan Suara Lain” (Elisabeth 2006). Seiring dengan perkembangan aktivitasnya, *Caritas Australia* menyatakan posisinya terhadap Papua Barat, yakni kehadirannya di Papua Barat bukan untuk mendukung atau menolak gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka atau mendukung adanya upaya memisahkan diri dari Indonesia, melainkan bergerak berdasarkan naluri kemanusiaan, yaitu menegakkan Hak Asasi Manusia setiap individu dan

memberikan perlindungan kepada mereka yang tertindas berdasarkan prinsip kemanusiaan dan keagamaan.

BAB III

ANALISIS STRATEGI INTERNASIONALISASI ISU YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA DALAM USAHANYA MENDAPAT DUKUNGAN INTERNASIONAL TAHUN 2016-2020

Pada bab 3 ini penulis akan membahas mengenai analisis upaya internasionalisasi isu yang dilakukan oleh OPM dalam usahanya untuk mendapat dukungan dari masyarakat internasional menggunakan kacamata teori model *Externalizing The Contention* yang ditulis oleh Sydney Tarrow. Adapun terdapat beberapa indikator yang seringkali digunakan oleh kelompok separatis untuk melakukan externalisasi isu, antara lain :

Table 3 - Indikator Externalisasi Isu oleh Sydney Tarrow

Indikator	Aktor Utama	Upaya Yang dilakukan	Tujuan
<i>Domestic Context</i>	Kelompok Separatisme	Mengumpulkan informasi mengenai tindakan represif, isu pelanggaran HAM, isu ketidakadilan yang mereka dapatkan, serta Pemerintah yang terkesan lamban dalam mengabulkan keinginan mereka.	Tujuan dari <i>domestic context</i> adalah untuk mengumpulkan berbagai 'bukti' yang bisa mereka manfaatkan untuk menarik perhatian internasional.
<i>Framing The Contention</i>	Kelompok Separatisme	Melakukan <i>framing</i> berita atas informasi yang telah dikumpulkan dan kemudian disebarluaskan kepada dunia Internasional.	Untuk mencari atensi dunia internasional dengan melakukan tindakan <i>framing</i> , seperti memanipulasi informasi, dan manipulasi kejadian
<i>Collective Action Form</i>	Kelompok Separatisme	Melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang memberikan dukungannya kepada kelompok separatisme.	Mendapatkan dukungan dari dunia internasional dan menjalin kerja sama dengan pihak pendukungnya.

Sumber : diolah dari A Composite Model of Externalization. Source The New Transnational Activism : Externalizing Contention by Sydney Tarrow, 1998 by Cornell University.

Dengan menggunakan model teori ini diharapkan penulis dapat melakukan analisis menggunakan logika mengenai sifat dari sebuah kelompok separatis. Secara keseluruhan, pembahasan pada bab ini bersifat deskriptif, dimana keseluruhan isi dari bab ini diulas oleh penulis menggunakan implementasi dari teori *Externalizing The Contention* untuk membantu penulis dalam penelitian mengenai upaya-upaya yang sering dilakukan oleh kelompok separatisme dalam mencari dukungan internasional, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana strategi yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka dalam memperoleh dukungan internasional untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dalam upaya untuk menjabarkan analisis, penulis akan memberikan tiga elemen contoh kasus yang saling berkaitan.

Gerakan separatisme adalah gerakan yang dilakukan oleh sebuah kelompok disuatu wilayah bagian negara dengan tujuan untuk memisahkan diri. Tarrow mengatakan dalam bukunya yang berjudul *The New Transnational Activism* (Tarrow, *The New Transnational Activism* 2005) bahwa individu atau kelompok masyarakat yang bergerak kearah aktivitas transnasionalisme akan dibatasi dan didukung oleh jaringan domestik, dalam prosesnya mereka mempelajari proses-proses transisi politik domestik setiap negara, dan ketika mereka kembali ke wilayahnya, mereka akan membentuk sebuah tindakan baru seperti bagaimana cara membuat bingkai untuk isu yang akan mereka bawa ke dunia internasional agar diterima hingga kemungkinan adanya identitas baru bagi mereka yang suatu waktu bisa terjadi konflik antara politik domestik dan politik internasional.

Berdasarkan uraian pendapat Tarrow diatas dapat disimpulkan bahwa (1) aktivisme itu bersifat individual, sedangkan gerakan sosial itu bersifat sosial, dapat

dikatakan bersifat sosial ketika para aktivis ini melakukan kerja sama dengan menyatukan kepentingan mereka atau bisa disebut *collective action*. (2) Dalam melakukan aksinya, para aktivis ini bisa melangsungkan kegiatannya dengan menargetkan wilayah lokal, nasional, hingga internasional. Apabila ingin mencapai hasil yang lebih efisien, para aktivis ini akan membentuk sebuah organisasi gerakan sosial. Dalam upayanya membentuk jaringan, aktivis ini akan membentuk gerakan yang disebut “gerakan sosial” sedangkan aksi kolektif yang sering dilakukan para aktivis ini adalah “kampanye gerakan sosial”. (3) Jaringan yang terbentuk dari adanya gerakan-gerakan tersebut bersifat dinamis atau dapat berubah. Dalam prosesnya, terdapat upaya-upaya transisi yang dilakukan dengan membawa isu domestik ke internasional, hal inilah yang disebut dengan internasionalisasi isu (Fauzan 2018).

Sebelum memulai penjelasan lebih lanjut, penulis ingin menjelaskan secara singkat terkait penemuan fakta bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) memiliki afiliasi dengan organisasi lain, yaitu *United Nation Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) (Zahadi and Musfiroh 2018). Hal ini dikarenakan adanya persyaratan dari *Melanesian Spearhead Group* yang mengatakan apabila Papua Barat ingin bergabung ke MSG, maka Papua Barat harus berada dalam satu kesatuan, sehingga diputuskan untuk membentuk ULMWP yang diketuai oleh Benny Wenda yang kemudian bertugas sebagai perwakilan untuk melakukan lobi-lobi politik. Dengan begitu, dalam menjelaskan bab 3 ini, penulis akan berfokus pada aksi-aksi yang dilakukan oleh ULMWP yang mewakili OPM disektor lobi-lobi politik.

Berdasarkan tabel 1.3 terdapat tiga indikator yang disebutkan oleh Sidney Tarrow sebagai upaya eksternalisasi isu yang dilakukan oleh kelompok separatism, antara lain :

3.1 Domestic Context Yang Dilakukan oleh ULMWP

Upaya pertama dalam melakukan eksternalisasi isu yang sering dilakukan oleh gerakan separatis adalah *domestic context*, hal ini dilakukan dengan berfokus kepada apa yang dimiliki oleh kelompok separatis atau bisa juga disebut sebagai “blokade” klaim domestik yang mendukung mereka untuk melakukan intervensi internasional. *Domestic context* seringkali dilatarbelakangi adanya tindakan represi dari pemerintah dan kurangnya respon terhadap klaim domestik, isu yang sering diangkat oleh kelompok separatis adalah isu pelanggaran HAM. Dalam hal ini, OPM seringkali melakukan *Domestic Context*, khususnya dalam kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan adanya rasisme yang seringkali mereka rasakan dengan membingkai isu lama dengan cara yang baru agar dapat terus diterima oleh masyarakat internasional.

Berdasarkan beberapa klaim domestik yang dimiliki, ULMWP kemudian menarik simpatisan dengan cara-cara yang bersifat *soft* tanpa kekerasan, yaitu mengadakan kampanye propaganda terkait isu domestik, hal ini diwujudkan melalui pembentukan beberapa *website* resmi, yaitu freewestpapua.org, bennywenda.org, dan ulmwp.org. Ketiga *website* tersebut berisikan hal yang sama, yaitu terkait sejarah pergerakan kemerdekaan Papua, Visi dan Misi dari masing-masing *website*, serta berbagai berita propaganda yang mereka buat untuk menarik simpatisan.

ULMWP melakukan upaya pengumpulan informasi domestik yang terjadi di Papua Barat yang kemudian diunggah melalui *website* resmi mereka untuk menjadikan isu tersebut sebagai isu yang akan menarik simpatisan dari dunia Internasional, ditambah dengan bahasa yang digunakan dalam *website* mereka adalah Bahasa Inggris, hal ini agar memudahkan bagi siapa saja yang ingin mengetahui terkait isu Papua.

Adapun *domestic context* yang dilakukan oleh OPM secara ringkas diuraikan dalam tabel berikut :

Table 4 - Upaya Domestic Context Untuk Menarik Dukungan Vanuatu

No	Domestic Context Yang Dilakukan	Instrumen	Tujuan
1	Pembentukan identitas kelompok	Website Free West Papua Campaign (freewestpapua.org)	Menarik dukungan dengan memanfaatkan persamaan ras, yaitu ras Melanesia
2	Pembentukan Propaganda terkait kolonialisme Indonesia	Website ULMWP (ULMWP.org)	Menarik dukungan dengan membuat propaganda terkait kolonialisme Indonesia.
3	Menyebarkan propaganda terkait pengiriman 600 personel TNI ke Nduga dengan mengatakan bahwa pengiriman pasukan tersebut memberikan ancaman keamanan bagi masyarakat Papua.	Website Free West Papua Campaign (Freewestpapua.org)	Menyebarkan propaganda terkait pelanggaran HAM serta kondisi di wilayah Nduga.

Sumber diolah dari : *website* resmi freewestpapua.org dan ulmwp.org

1. Pembentukan Identitas Kelompok

Papua Barat merupakan wilayah di Indonesia yang tergabung dalam ras Melanesia, hal ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok separatis ini dalam menarik dukungan dari negara-negara yang memiliki kesamaan ras Melanesia, seperti Vanuatu. Didalam konstitusi hukum

Vanuatu, negara ini mengadopsi ideologi ‘Melanesia Merdeka’. Paham ideologi ini diperkuat dengan adanya kulturalisme Melanesia sebagai bentuk solidaritas antar sesama ras Melanesia di Pasifik Selatan agar terbebas dari kolonialisme. Melihat adanya peluang untuk mendapatkan dukungan, kemudian dimanfaatkan oleh ULMWP dalam melakukan pendekatannya dengan Vanuatu.

Melansir dari postingan di ulmwp.org (ULMWP 2016), ULMWP mengatakan bahwa adanya pertumbuhan identitas Melanesia di masyarakat Papua Barat. Dalam penjelasannya, ULMWP menyebutkan bahwa Papua Barat adalah negara Melanesia yang berbatasan dengan Papua Nugini di bagian Timur. ULMWP juga menyebutkan bahwa Indonesia tidak hanya penjajah yang ingin menguasai wilayah Papua, namun juga ingin menghapuskan identitas Melanesia di tanah Papua. Dalam penjelasannya, ULMWP menyebutkan bahwa upaya kemerdekaan ini tidak hanya untuk membebaskan diri dari kolonialisme Indonesia, namun juga ingin membangkitkan kembali identitas Melanesia yang memudar akibat kolonialisme Indonesia. Mereka juga menyebutkan bahwa masyarakat Papua dilarang untuk mempelajari tentang budaya mereka yang sebenarnya, yaitu Melanesia, mereka dipaksa untuk mempelajari budaya Indonesia dan memakai bendera nasional Indonesia.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa dengan memanfaatkan persamaan identitas ras Melanesia, ULMWP kemudian berusaha untuk memposisikan diri mereka sebagai anggota dari *Melanesian Family*, hal

ini juga dapat dilihat dari kutipan Sekretaris Jendral ULMWP, Octovianus Mote (ULMWP 2015), dalam pertemuan bersama MSG tahun 2015 lalu, Adapun isi kutipan tersebut sebagai berikut :

“I thank our leaders in Melanesian, especially the leaders from Solomon Islands, Vanuatu, and FLNKS (Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste – New Caledonia) for publicly supporting us in this quest. Your public support for our struggle gives our people hope that you have heard our cries, they affirm that we are part of this Melanesian family” (ULMWP 2015).

Ini merupakan upaya ULMWP untuk lebih mendekatkan diri ke bangsa Melanesia dengan menyebutkan ‘keluarga Melanesia’ dengan menjadikan warga Papua Barat bagian dari bangsa Melanesia.

2. Pembentukan Propaganda Menggunakan Identitas Kelompok Terjajah

Mengetahui fakta bahwa fokus utama dari Vanuatu terhadap ras Melanesia adalah untuk membebaskan ras Melanesia dari kolonialisme, kemudian dimanfaatkan oleh ULMWP dalam melancarkan aksi-aksi propagandanya. Selain menarik dukungan Vanuatu dengan identitas ras Melanesia, kelompok separatis ini kemudian menyebutkan bahwa mereka adalah bagian dari kelompok yang terjajah, dalam hal ini mereka merasa bahwa mereka sedang berada dibawah kolonialisme Indonesia yang hanya menginginkan sumber daya alam mereka yang melimpah.

Mengutip dari salah satu berita di ulmwp.org (ULMWP 2016), ULMWP menyamakan kelompoknya dengan Palestina sebagai negara yang terjajah. Mereka juga mempertanyakan terkait posisi Indonesia

yang mendukung kemerdekaan Palestina namun melakukan penjajahan di tanah Papua. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa ULMWP dalam upaya untuk menarik dukungan Vanuatu kemudian memposisikan dirinya sama dengan Palestina, yaitu negara yang sama-sama terjajah, sehingga mereka dapat menguatkan alasan Vanuatu untuk mendukung mereka, yaitu ras Melanesia yang sedang dijajah.

3. Kekerasan Terhadap Pekerja Jalan Trans Papua

Sejak terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, pembangunan di Papua merupakan salah satu program kerja unggulannya. Hal ini kemudian mendapat banyak dukungan, khususnya dari warga lokal Papua itu sendiri, karena pembangunan jalan tentu akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan di Papua. Meski pembangunan ini mendapat banyak dukungan dari warga lokal, terdapat kelompok yang sangat menentang proyek ini, OPM sudah memberikan peringatannya kepada pemerintah jika pembangunan di Papua dilakukan, maka OPM tidak akan segan untuk menembak mati siapapun yang terlibat dalam pembangunan tersebut. Ancaman yang diberikan OPM bukanlah ancaman belaka, berikut tiga peristiwa penembakan yang dilakukan oleh OPM kepada para pekerja pembangunan jalan dan jembatan Trans Papua :

- Pada tanggal 3 Desember 2018, kelompok separatis OPM dibawah pimpinan Egianus Kogoya melakukan penyerangan kepada rombongan pekerja proyek pembangunan jalan dan jembatan Trans Papua. Setidaknya korban tewas dalam penyerangan ini berjumlah 31 pekerja. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2018, OPM masih

dibawah kepemimpinan Egianus Kogoya kembali melakukan penyerangan kepada para pekerja jalan Trans Papua, penyerangan kali ini menewaskan 16 warga sipil, 1 prajurit TNI, 5 orang hilang, dan 7 orang yang belum teridentifikasi.

- Pada tanggal 4 Maret 2019, TNI mengirimkan sebanyak 600 prajurit TNI yang terdiri dari 450 personel Yonif Raider 431 Kostrad, dan 150 personel dari Yonzipur ke Papua untuk menjalankan tugas sebagai pengamanan pekerja pembangunan Trans Papua. Hal ini dilakukan usai kembali terjadinya penembakan kepada para pekerja pembangunan jalan dan jembatan Trans Papua di Kali Yigi, Kali Aurak, Distrik Yigi, Nduga, yang menewaskan setidaknya 16 pekerja.

ULMWP sebagai kelompok pro kemerdekaan yang sangat menentang adanya pembangunan di Papua. Isu ini kemudian diangkat oleh ULMWP ke dunia internasional dengan dalih Pemerintah Indonesia telah memberikan ancaman ketakutan kepada masyarakat Papua, khususnya warga Nduga karena mengirimkan sebanyak 600 personel TNI. Mereka berdalih bahwa apa yang dilakukan oleh Panglima TNI adalah sebuah keputusan yang tidak adil, mengutip pernyataan dari Raga Kogoya, salah satu warga Nduga yang diberitakan melalui website Freewestpapua.org (Freewestpapua.org 2019) menjelaskan bahwa apa yang dilakukan TNI merupakan ancaman keamanan, mereka merasa bahwa mereka sedang dijadikan sebagai sasaran operasi keamanan. ULMWP juga mengatakan bahwa Papua merupakan daerah termiskin meski memiliki sumber daya alam yang melimpah, hal ini

dikarenakan adanya keserakahan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Papua.

Seperti yang disebutkan oleh Sydney Tarrow, kelompok separatis umumnya membawa isu pelanggaran HAM ke dunia internasional, karena isu pelanggaran HAM lah yang paling mungkin untuk mendapatkan simpati dari masyarakat internasional, oleh karena itu, melalui website resminya, ULMWP membagikan propaganda terkait kondisi ‘terkini’ di wilayah Papua, sehingga mampu menarik perhatian masyarakat internasional, khususnya Vanuatu yang akan mendukungnya atas dasar kebebasan terhadap seluruh ras Melanesia.

3.2 Framing The Contention

Upaya kedua yang sering dilakukan oleh gerakan separatis adalah *Framing contention*, upaya yang dilakukan adalah dengan memanipulasi sebuah berita terkait isu domestic yang ada dengan membuat frame atau pembingkai ulang sebuah berita domestik yang kemudian berita tersebut akan disebarluaskan kepada dunia internasional untuk mendapatkan atensi. Berita yang telah dimanipulasi tadi kemudian disebarluaskan oleh OPM melalui tiga cara, yaitu melalui diplomasi politik, melalui website resminya, yaitu *freewestpapua.org* dan *bennywenda.org*, serta menjadi narasumber diberbagai wawancara dengan media elektronik.

Adapun berikut merupakan contoh manipulasi berita yang dilakukan oleh OPM terkait isu domestik yang kemudian disebarluaskan kepada dunia internasional :

Table 5 - Upaya Framing The Contention OPM

Waktu	Instrumen	Upaya yang dilakukan	Tujuan
11 Juli 2018	Website Free West Papua Campaign (freewestpapua.org)	Membuat sebuah pemberitaan yang disertakan dengan video mengenai Indonesia yang berupaya untuk memberhentikan Melanesians Art and Festival yang mendukung Papua Barat.	Menarik dukungan dengan menyampaikan isu upaya penghapusan identitas ras Melanesia dari tubuh rakyat Papua.
10 Maret 2020	Website ULMWP (ulmwp.org)	Menyampaikan propaganda terkait isu kolonialisme Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya alam Papua	Menarik dukungan dengan menyampaikan isu kolonialisme dan pelanggaran HAM
11 Mei 2020	Website ULMWP (ulmwp.org)	Menyampaikan propaganda mengenai isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia dengan menggunakan isu Covid-19	Menarik dukungan dengan menyampaikan isu pelanggaran HAM
7 Desember 2020	Website Free West Papua Campaign (freewestpapua.org)	Menyampaikan propaganda terkait 245 tahanan politik baru yang ditangkap oleh aparat keamanan Indonesia	Menarik dukungan melalui adanya upaya pelanggaran HAM

Sumber diolah dari : Website freewestpapua.org dan ulmwp.org

Adapun upaya *framing the contention* yang dilakukan oleh ULMWP diuraikan sebagai berikut :

1. Propaganda Mengenai Indonesia Yang Mencoba Untuk Menghentikan Dukungan Dari Melanesian Kepada Papua Barat

Pada tanggal 11 Juli 2018, melalui *website* freewestpapua.org (Free West Papua Campaign 2018), ULMWP membuat sebuah pemberitaan mengenai adanya upaya penghentian dari pihak pejabat Indonesia terhadap orang Melanesia yang mendukung Papua Barat. Dalam pemberitaan tersebut juga dilampirkan sebuah video yang menampilkan seorang pria yang disebut sebagai salah satu pejabat Indonesia yang mencoba untuk menghentikan pria yang membawa bendera, akan tetapi tindakan penghentian ini dapat dicegah. Peristiwa ini terjadi di Kepulauan Solomon pada saat acara Festival Seni dan Budaya Melanesia berlangsung.

Gambar 1- Indonesia mencoba menghentikan dukungan dari Melanesia

**Melanesian Arts and Culture festival.
Indonesia tries to stop Melanesians
supporting West Papua.**

JULY 11, 2018



At this weeks Melanesian Arts and Culture festival (MACfest) held in the Solomon Islands

Sumber : <https://www.freewestpapua.org/2018/07/11/melanesian-arts-and-culture-festival-indonesia-tries-to-stop-melanesians-supporting-west-papua/>

Apabila melihat dari pemberitaan yang disampaikan serta video yang dilampirkan (Free West Papua Campaign 2018), penulis berasumsi bahwa ini merupakan upaya *black campaign* yang dilakukan oleh partisipan kelompok separatis dalam upaya untuk menyerang pemerintah Indonesia.

Perbandingan antara versi berita dari ULMWP dan versi berita dari pemerintah Indonesia:

Gambar 2 - Pemberitaan dari pemerintah Papua Barat



Sumber : <https://penghubung.papua.go.id/2018/07/09/partisipasi-indonesia-di-macfest-2018-festival-melanesia-di-honiara-solomon-islands/>

Asumsi *black campaign* ini berdasarkan adanya kejanggalan dari pemberitaan, festival seni dan budaya Melanesia yang berlangsung di Kepulauan Solomon disambut baik oleh pemerintah Indonesia, hal ini dapat dilihat dari berita Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua di Jakarta (Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua di Jakarta 2018) dengan mengirimkan partisipan dari Provinsi Papua. Pemerintah Indonesia juga turut menampilkan pemutara film yang memperkenalkan tentang kebudayaan Melanesia di Indonesia, tempat-tempat wisata, serta menampilkan kondisi dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki budaya yang sama, yaitu Melanesia. Kemudian pemberitaan mengenai hal ini hanya ada di *website* resmi kelompok separatis, sehingga sangat mampu untuk dibuat *framing* yang berlebihan, dan yang terakhir tidak ada tanggapan sama sekali dari Indonesia mengenai hal ini, yang

berarti bahwa pemerintah Indonesia juga tidak mengetahui apabila ada salah satu pejabatnya melakukan upaya penghentian seperti yang diberitakan. Oleh karena itu penulis berpendapat ini merupakan upaya dari ULMWP dalam melakukan propaganda isu ke dunia internasional.

2. Menjadikan PT. Freeport Sebagai Salah Satu Isu Kemanusiaan

Isu selanjutnya yang dibingkai ulang adalah mengenai PT. Freeport, dalam pemberitaannya melalui website ulmwp.org (ulmwp 2020), ULMWP mengatakan bahwa adanya pengusiran yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap penduduk desa disekitar PT. Freeport. Dalam pemberitaannya, mereka mengatakan bahwa Indonesia memanfaatkan pandemi covid-19 sebagai upaya untuk menyembunyikan operasinya untuk mengurangi populasi desa, mereka juga menyebutkan bahwa militer memaksa penduduk desa untuk pergi ke hutan tanpa tujuan yang jelas, sehingga berakhir mati kelaparan. Mereka juga menyebutkan ada sekitar 700 tentara militer baru yang dikirimkan untuk menjalankan misi ini.

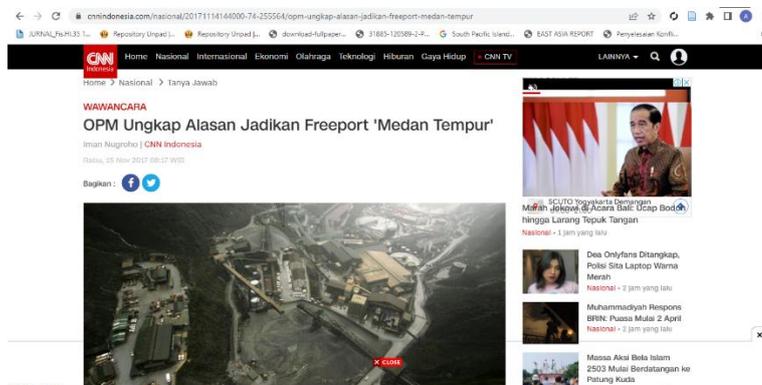
Gambar 3 - Propaganda terkait PT. Freeport



Sumber : <https://www.ulmwp.org/urgent-alert-indonesian-military-depopulating-villages-to-protect-freeport-gold-mine>

Isu ini kemudian digunakan sebagai upaya menarik perhatian internasional dengan mengatasnamakan pelanggaran HAM serta adanya kolonialisme yang dilakukan Indonesia atas tanah Papua dengan mengambil sumber daya alam Papua sebanyak-banyaknya. Penulis berasumsi bahwa ini merupakan isu lama yang kemudian dibingkai kembali oleh ULMWP, dimana pada tahun 2017, salah satu perwakilan dari TPN-OPM diwawancarai oleh media CNN Indonesia terkait alasan dari kelompok separatis yang menjadikan Freeport sebagai ‘medan tempur’ melawan TNI/Polri.

Gambar 4 - Wawancara antara CNN Indonesia dan OPM



Sumber:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171114144000-74-255564/opm-ungkap-alasan-jadikan-freeport-medan-tempur>

Dalam wawancara tersebut, OPM mengakui bahwa adanya penahanan dan penyiksaan terhadap informan yang berasal dari TNI/Polri. Mereka juga mengakui bahwa masyarakat yang berada di Distrik Tembagapura tidak bisa kemana-mana dikarenakan adanya ‘perang’ antara OPM dan TNI/Polri. Lalu pemilihan lokasi Freeport ini sebagai bentuk

upaya dari OPM untuk menunjukkan kepada pemerintah Indonesia, PBB, Amerika Serikat, Belanda, dan 22 negara lainnya yang memiliki andil dalam PT. Freeport ini untuk segera membuka mata dan mengembalikan hak kedaulatan kemerdekaan kepada Papua Barat (Nugroho 2017).

3. Memanfaatkan Pandemi Covid-19 Untuk Melakukan Propaganda

Benny Wenda selaku pemimpin dari ULMWP mengatakan bahwa ia mendapatkan berita dari Papua Barat mengenai penyiksaan terbaru yang dilakukan oleh Indonesia dibalik upaya penanganan krisis pandemi covid-19. Benny Wenda juga mengatakan bahwa rakyat Papua banyak yang disiksa dan dipenjara. Benny Wenda juga mengatakan bahwa Indonesia menjadikan lockdown sebagai alasan untuk melancarkan operasi militer baru, yaitu penghilangan orang Papua Barat. Dalam pemberitaan itu juga disebutkan bahwa banyak perempuan dan anak-anak mengungsi ke hutan untuk meminta perlindungan dari KNPB di Sorong, Papua. Pemberitaan itu juga menyebutkan bahwa Tim Tanggap Covid-19 di Timika terdiri dari TNI-Polri, dan mempertanyakan terkait Indonesia yang mengirim dokter yang terinfeksi covid-19 ke desa terpencil.

Gambar 5 - Propaganda mengenai penanganan covid-19



Sumber : <https://www.ulmwp.org/benny-wenda-indonesia-using-covid-crisis-to-arrest-imprison-torture>

Berdasarkan berita diatas, penulis berpendapat bahwa lagi-lagi ULMWP dalam upaya menarik dukungan selalu membawa persoalan pelanggaran HAM, padahal Indonesia memang mengalami krisis pada saat adanya pelonjakan kasus covid-19.

Gambar 6 - Sinergitas TNI-Polri dalam penanganan covid-19

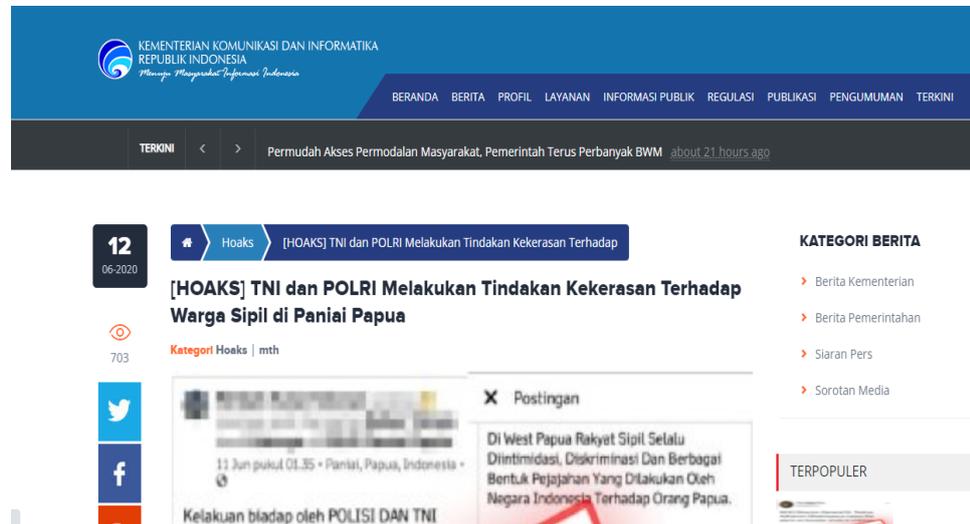


Sumber: [https://covid19.go.id/p/berita/peran-polri-dan-tni-
implementasikan-instruksi-presiden-nomor-6-tahun-2020](https://covid19.go.id/p/berita/peran-polri-dan-tni-implementasikan-instruksi-presiden-nomor-6-tahun-2020)

Berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 (Presiden Republik Indonesia 2020), TNI-Polri menjadi bagian dari tim garda depan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. TNI-Polri juga dikerahkan untuk membantu dalam menangani pandemi dan memastikan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat, selain itu sinergitas TNI-

Polri juga diminta untuk memberikan pembinaan terhadap masyarakat terkait upaya pencegahan penyebaran virus covid-19.

Gambar 7 - Klarifikasi Indonesia terkait propaganda OPM



Sumber : https://kominfo.go.id/content/detail/27100/hoaks-tni-dan-polri-melakukan-tindakan-kekerasan-terhadap-warga-sipil-di-paniai-papua/0/laporan_isu_hoaks

Selanjutnya, terkait pemberitaan mengenai adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh TNI-Polri terhadap masyarakat Papua telah diklarifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 2020) bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan oleh TNI-Polri seperti yang diberitakan, korban luka yang diberitakan berasal dari adanya warga yang mencoba untuk menerobos portal yang dijaga oleh aparat gabungan TNI-Polri dan luka yang didapat karena korban terkena kawat duri saat mencoba untuk masuk melalui celah disamping portal. Namun, lagi-lagi hal ini dijadikan bahan untuk melakukan *framing* berita mengenai pelanggaran HAM.

4. Propaganda Tekait Aktivis Pro Kemerdekaan

Berita selanjutnya yang dibentuk oleh OPM adalah penahanan yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia terhadap 245 tahanan politik di Papua Barat. Dalam berita yang ditulis, OPM mengatakan bahwa terdapat sebanyak 245 tahanan politik baru yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 hingga 30 September 2020, OPM mengatakan bahwa ini merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia masyarakat Papua yang ingin menuntut kemerdekaan atas wilayahnya sendiri. OPM juga mengatakan bahwa pada tahun 2019-2020, seluruh tahanan politik dipaksa untuk menandatangani ‘Deklarasi Kesetiaan’ sebagai salah satu syarat untuk pembebasan mereka. ‘Deklarasi Kesetiaan’ ini merupakan upaya pembuktian ‘taubat’ bagi para kelompok separatis agar kembali ke kesetiannya terhadap NKRI. Dalam pemberitaannya, OPM menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia bagi para tahanan politik yang ingin memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi Papua Barat yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Gambar 8 - Penahanan terhadap 245 tapol Papua



Sumber : <https://www.freewestpapua.org/2020/12/07/245-new-political-prisoners-in-west-papua/>

Gambar 9 - Respon Indonesia terkait tapol Papua



Sumber : <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52850488>

Pemberitaan terkait pelanggaran HAM terhadap 245 tahanan politik Papua kemudian menimbulkan banyaknya dukungan, khususnya dari pegiat HAM yang menyerukan adanya pembebasan terhadap tahanan politik Papua. Respon pemerintah Indonesia kemudian mengatakan bahwa pembebasan tahanan politik harus sesuai dengan prosedur hukum hal ini tidak boleh sembarangan dikarenakan adanya masalah keamanan dan keselamatan masyarakat yang dipertaruhkan, selain itu apabila kita melihat dari sudut pandang pemerintah Indonesia, apa yang dilakukan adalah upaya persuasif dalam melakukan pendekatan kepada kelompok separatis yang memberikan ancaman bagi kesatuan Republik Indonesia. Pemaksaan dalam menandatangani 'Deklarasi Kesetiaan' merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk memastikan bahwa kelompok separatis ini akan kembali mengakui bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI dan tidak dapat dipisahkan.

3.3 Collective Action Form Antara OPM Dan Pendukungnya

Upaya ketiga dari internasionalisasi isu yang dilakukan oleh OPM adalah *Collective Action Form*. Tujuan akhir dari berbagai upaya yang dilakukan oleh kelompok separatisme adalah selain untuk menarik simpatisan dan dukungan dari dunia internasional juga untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang mendukungnya. *Collective action form* merupakan upaya kelompok separatis untuk mendapatkan dukungan dan perhatian dari sekutu yang memiliki potensial, setelah mereka berhasil mendapatkan dukungan dan simpati dari dunia internasional, mereka kemudian menjalin kerjasama dengan pihak pendukungnya.

Dalam indikator ini, setelah ULMWP berhasil mendapatkan dukungan dari Vanuatu, mereka kemudian melakukan *collective action form*, atau kerja sama antara kelompok separatis dan pendukungnya. Adapun kerja sama yang dilakukan oleh ULMWP dan Vanuatu antara lain:

Table 6 - Bentuk Kerja Sama Antara ULMWP dan Vanuatu

No	Waktu	Bentuk Kerja Sama	Hasil
1	29 April 2016	Melakukan kerja sama untuk mengadakan sebuah gerakan sosial dengan tujuan untuk mendesak pemberian keanggotaan utuh OPM di MSG	Belum berhasil menjadi anggota MSG
2	2016 - 2020	Menyuarakan isu Papua Barat di Forum PBB	Vanuatu secara vokal menyuarakan isu Papua Barat di Forum PBB
3	25 Januari 2019	Penyelundupan perwakilan ULMWP di delegasi Vanuatu pada sidang Dewan Keamanan PBB	Belum berhasil mencapai tujuannya
4	2016-2020	UNPO	Berhasil mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang mendukung

Sumber diolah dari : website ulmwp.org, freewestpapua.org, dan unpo.org

Adapun kerja sama yang dilakukan oleh OPM dan pendukungnya diuraikan sebagai berikut :

1. Kerja Sama Dalam Upaya Untuk Menjadikan Papua Barat Sebagai Anggota MSG

Gambar 10 - Sejumlah massa yang mengikuti gerakan sosial



Sumber : <https://www.ulmwp.org/mass-rally-vanuatu-calls-west-papuas-msg-membership>

Pada tanggal 29 April 2016, OPM bekerja sama dengan Vanuatu membentuk sebuah gerakan sosial yang bertemakan “*calls for West Papua’s membership of the Melanesian Spearhead Group*” di Vanuatu, gerakan sosial ini dihadiri oleh pendukung pro kemerdekaan dan didukung oleh Perdana Menteri Vanuatu Hon. Charlot Salwai yang melalui pernyataan resminya mengatakan bahwa pemberian keanggotaan secara penuh terhadap Papua sebagai anggota MSG (ULMWP 2016). Meskipun Kerja sama antara Vanuatu dan OPM ini menghasilkan gerakan yang bersifat internasional, namun belum

mampu mengubah kebijakan untuk menjadikan Papua Barat sebagai anggota MSG secara penuh.

2. Menyuarakan Isu Papua di Majelis Umum PBB

Sejak Vanuatu kemudian menjadikan isu Papua sebagai isu utama di negaranya, perhatian dan dukungan dari Vanuatu ke Papua Barat tidak pernah berkurang sedikitpun, hal ini dapat dilihat dari vokalnya Vanuatu dalam menyuarakan isu Papua Barat di Majelis Umum PBB sejak tahun 2016 hingga 2020. Kerja sama antara kelompok separatis dan Vanuatu memberikan dampak yang besar bagi kelompok tersebut, adanya harapan besar yang disematkan kepada Vanuatu sebagai salah satu pendukungnya yang paling vokal dalam menyuarakan isu Papua di forum internasional. Adapun isu yang dibawa oleh Vanuatu disetiap pernyataannya di Forum PBB, antara lain :

- Tahun 2016

Pada tanggal 22 Juni 2016, Vanuatu bersama Kepulauan Solomon menyampaikan dukungannya terhadap Isu Papua di pertemuan dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Dalam kesempatannya, Vanuatu mengatakan bahwa pihaknya terus menerima laporan terkait kasus pelanggaran HAM di Papua Barat, pihaknya juga menyebutkan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap hak untuk mendapatkan kebebasan dan berserikat. Di akhir pidatonya, perwakilan dari Vanuatu mengajak Dewan HAM

PBB untuk melakukan penyelidikan terkait pelanggaran HAM di Papua Barat (Free West Papua Campaign 2016).

- Tahun 2017

Pada tahun 2017 melalui Perdana Menteri H.E. Mr. Charlot Salwai Tabimasmal, Vanuatu menyampaikan dukungan serta konsistensi dari Vanuatu terhadap dukungannya untuk rakyat Papua Barat. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Vanuatu tidak lupa menyebutkan isu terkait pelanggaran HAM di Papua Barat seperti penyiksaan, pembunuhan, kekerasan seksual, dan penahanan dengan alasan yang tidak jelas. Di akhir pidatonya, Perdana Menteri Vanuatu menyebutkan bahwa Vanuatu mendukung hak dasar penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua (Free West Papua Campaign 2017).

- Tahun 2018

Pada tanggal 28 September 2018, Vanuatu kembali mengangkat isu Papua di Sidang Majelis Umum PBB. Isu yang dibawa tak lain adalah pelanggaran HAM, namun pada tahun ini Vanuatu juga menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia memperlakukan rakyat Papua secara diskriminatif.

- Tahun 2019 dan 2020

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Pada tahun 2019 dan 2020, melalui Perdana Menteri, Charlot Salwai Tabimamas, Vanuatu kembali menyinggung isu pelanggaran HAM di Papua dalam pidatonya di Majelis Umum PBB. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, isu yang dibawa oleh Vanuatu tidak mengalami perubahan, yaitu seputar pelanggaran HAM, sikap diskriminatif, dan mendukung penentuan nasib sendiri.

Dari uraian diatas, dapat penulis asumsikan bahwasannya kerja sama antara ULMWP dan Vanuatu mengenai membawa isu Papua Barat ke forum PBB membuahkan hasil yang baik, meskipun Vanuatu seringkali mendapat balasan dari Pemerintah Indonesia disetiap pidatonya, namun Vanuatu tetap tidak berhenti mendukung kelompok separatis ini. Namun, dukungan ini tidak memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia, karena menurut Indonesia apa yang dibawa oleh Vanuatu adalah isu lama.

3. Penyelundupan Benny Wenda Ke Pertemuan Dengan Dewan HAM PBB

Pada tanggal 25 Januari 2019, Delegasi Vanuatu menyelundupkan Benny Wenda selaku pemimpin dari ULMWP ke dalam kunjungan kehormatan ke kantor KT HAM PBB di Jenewa, Swiss. Kunjungan kehormatan ini dilakukan dengan agenda pembahasan mengenai laporan penegakan HAM tahunan Vanuatu di Dewan HAM PBB. Delegasi Vanuatu tidak memasukkan nama Benny Wenda secara resmi di daftar resmi delegasi yang hadir, sehingga Benny Wenda bisa lolos

untuk masuk ke acara kunjungan tersebut. Dalam kesempatan itu, Benny Wenda menyerahkan petisi yang telah ditandatangani oleh lebih dari 1,8 juta masyarakat Papua kepada KT HAM PBB, Michelle Bachelet.

Dalam kesempatan itu pula, Benny menyampaikan kepada Bachelet bahwa dibawah Pemerintahan Indonesia, warga Papua tidak memiliki kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat (CNN Indonesia 2019).

4. Unpresented Nations and Peoples Organization (UNPO)

Unpresented Nations and Peoples Organizations (UNPO) merupakan sebuah organisasi internasional yang berlokasi di Den Haag, Belanda yang berperan sebagai wadah bagi para penduduk asli negara yang sedang mengalami penjajahan, atau kelompok minoritas yang tidak mendapatkan pengakuan. Pada awal berdirinya, UNPO beranggotakan sebanyak 13 anggota, termasuk Papua Barat yang diwakili oleh kelompok separatis, dan kini UNPO telah beranggotakan sebanyak 47 anggota (UNPO 2010). Sebagai salah satu dari *founders* UNPO, OPM kemudian menjadikan isu Papua Barat sebagai salah satu isu utamanya. UNPO kemudian secara vokal memberikan dukungannya terhadap kelompok separatis OPM. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, UNPO tercatat telah beberapa kali menunjukkan dukungannya terhadap Papua Barat melalui pemberian informasi berbagai artikel yang dibagikan di *website* resminya.

Pada tahun 2016, UNPO membagikan artikel yang berjudul *West Papua: Ruthless Economic Exploitation and Oppression Amount to "Slow Motion Genocide"* (UNPO 2016), dimana dalam artikel tersebut UNPO

menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan ‘genosida gerak lambat’ terhadap masyarakat Papua Barat melalui adanya aktivitas pengrusakan lingkungan melalui aktivitas pertambangan. UNPO juga menyebutkan bahwa sejak zaman kepemimpinan Presiden Soeharto, tercatat sebanyak 500.000 masyarakat asli Papua tewas akibat kerusakan lingkungan ini.

Pada tahun 2017, UNPO membagikan sebuah artikel yang berjudul *West Papua: Right to Self-Determination Needs UN support* (UNPO 2017). Artikel ini menyatakan bahwa Papua Barat membutuhkan dukungan dari PBB untuk mendapatkan hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua Barat. UNPO juga menyebutkan bahwa PBB telah lalai karena mengabaikan tindakan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat.

Pada tahun 2018, UNPO membagikan sebuah artikel yang berjudul *West Papua: Yanto Awerkion Sentenced to Jail for Involvement in Independence Petition* (UNPO 2018). Artikel ini mengatakan bahwa terdapat penahanan kepada salah satu aktivis pro kemerdekaan, Yanto Awerkion yang terlibat dalam penandatanganan petisi kemerdekaan yang merupakan salah satu upaya dari kelompok separatis untuk melakukan referendum kemerdekaan pada tahun 2020. UNPO kemudian menyerukan kepada seluruh anggotanya untuk memberikan dukungan kepada Papua Barat atas hak untuk menentukan nasib sendiri bagi masyarakat Papua Barat. UNPO juga mengajak anggotanya untuk mengajak Indonesia secara bersama-sama untuk mengakhiri segala bentuk pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua Barat.

Pada tahun 2019, UNPO membagikan sebuah artikel yang berjudul *West Papua: Petition Calling for Self-Determination Handed Over to UN* (UNPO 2019). Artikel ini menyebutkan bahwa petisi yang diklaim telah ditandatangani oleh lebih dari 1,8 juta masyarakat Papua Barat telah diserahkan kepada Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet. UNPO juga menyebutkan, upaya penyerahan petisi ini untuk meminta perhatian dari PBB terkait isu Papua Barat, khususnya untuk memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi Papua Barat serta mengembalikan status Papua Barat kedalam agenda Komite Dekolonisasi.

Pada tahun 2020, UNPO kembali membagikan sebuah artikel yang berjudul *West Papua: Betrayed by the International Community* (UNPO 2020). UNPO mengatakan melalui artikelnya bahwa Papua Barat telah dikhianati oleh komunitas internasional. UNPO juga menyebutkan bahwa Papua Barat sedang mengingat kembali peringatan yang menyakitkan, yaitu 50 tahun ‘tindakan pilihan bebas’. Tindakan pilihan bebas yang dimaksud adalah perjanjian New York yang dimana masyarakat Papua diminta untuk melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah mereka ingin bergabung dengan Indonesia atau tidak. UNPO juga menuliskan bahwa pemungutan suara tersebut merupakan pemungutan suara yang palsu, dimana dalam prosesnya hanya melibatkan sedikit dari banyaknya masyarakat Papua Barat.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada bab sebelumnya, penulis berakhir pada kesimpulan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai sebuah studi kasus dalam penelitian yang menggunakan metode *externalizing the contention* telah berhasil memenuhi tiga indikator metode, yaitu (1) *domestic context*, (2) *framing the contention* dan (3) *collective action form*. Berdasarkan hasil akhir dari OPM yang telah memenuhi ketiga indikator tersebut, dapat dikatakan bahwa OPM menggunakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional yang sesuai dengan konsep *externalizing the contention* dan berhasil mendapatkan dukungan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memiliki kesimpulan akhir untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam upayanya untuk menarik dukungan internasional pada tahun 2016-2020 lebih menekankan sikap yang lembut, melakukan pendekatan tanpa kekerasan. OPM juga membagi tugas bersama organisasi lainnya dengan melakukan kerja sama dan membentuk *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)* yang diketuai Benny Wenda yang berfokus kepada upaya lobi-lobi politik dan penyebaran kampanye propaganda ke dunia Internasional. Adapun strategi yang digunakan oleh ULMWP, dijelaskan sebagai berikut :

Domestic Context, ini merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh ULMWP untuk menarik dukungan internasional. Adapun isu yang diangkat oleh

ULMWP, antara lain; (1) isu sejarah integrasi Indonesia ke Papua, (2) isu pelanggaran HAM, (3) membawa kesamaan identitas ras Melanesia, (4) memosisikan diri sebagai kelompok yang terjajah. Tujuan dari *domestic context* adalah untuk mengumpulkan berbagai ‘bukti’ yang bisa mereka manfaatkan untuk menarik perhatian internasional.

Framing The Contention, proses ini merupakan langkah kedua yang dilakukan oleh ULMWP dengan Melakukan *framing* berita atas informasi yang telah dikumpulkan dan kemudian disebarluaskan kepada dunia Internasional. Dalam hal ini, ULMWP seringkali melakukan manipulasi berita atau membingkai kembali mengenai kejadian-kejadian yang ada di Papua, khususnya terkait pelanggaran HAM dan kolonialisme. Berita yang telah dimanipulasi tadi kemudian disebarluaskan oleh ULMWP melalui media massa buatannya, yaitu *bennywenda.org freewestpapua.org*, dan *ulmwp.org*. Tujuan dari *framing the contention* adalah untuk mencari atensi dunia internasional dengan melakukan tindakan *framing*, seperti memanipulasi informasi, dan manipulasi kejadian agar menarik perhatian masyarakat.

Collective Action Form merupakan langkah ketiga yang dilakukan oleh ULMWP dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang memberikan dukungannya. Tujuan dari *collective action form* adalah untuk mengumpulkan dukungan dari dunia internasional serta menjalin kerjasama dengan pihak pendukungnya. Berdasarkan berbagai upaya yang dilakukannya, OPM berhasil mengumpulkan dukungan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Organisasi Internasional UNPO. Adapun kerjasama ini antara lain, 1) membuat gerakan sosial untuk mendukung keanggotaan

penuh Papua Barat di MSG, 2) secara aktif menyuarakan isu Papua Barat di Forum PBB dalam kurun waktu 2016-2020 3) menyelundupkan Benny Wenda kedalam sidang KT HAM PBB untuk menyerahkan hasil petisi referendum kemerdekaan Papua Barat dan 4) secara aktif menyuarakan isu Papua Barat di *website* resmi UNPO, unpo.org.

4.2 Rekomendasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan oleh OPM dalam melakukan internasionalisasi isu sehingga mampu menarik dukungan Internasional pada tahun 2016-2020. Mengingat kasus yang diangkat adalah kasus yang sangat sensitif, maka kurangnya literatur serta banyaknya pemberitaan propaganda terkait kedua belah pihak membuat penulis menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Dalam penelitian ini, penulis berfokus kepada upaya internasionalisasi isu oleh OPM dengan menggunakan metode *Externalizing The Contention*. Studi kasus dalam penelitian ini juga akan mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan untuk penelitian selanjutnya dapat melengkapi penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yang baru atau tetap menggunakan metode penelitian ini namun dengan analisis yang lebih mendalam. Penelitian menggunakan metode diplomasi publik atau human security kiranya dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan analisis lebih dalam terkait upaya internasionalisasi isu yang dilakukan oleh kelompok separatis dalam mencari dukungan di kancah internasional. Adanya keterbatasan dalam penelitian ini, penulis berharap bahwa

penelitian selanjutnya mampu melakukan penelitian dengan kajian-kajian yang berbeda sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Rianda, Bimbi, Yuswari O Djemat, and Angga Nurdin Rahmat. 2017. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Dukungan Republik Vanuatu Atas Kemerdekaan Papua Barat Tahun 2015-2016." *Dinamika Global* 02 (01): 101-107.
- AP. 2019. *Jejak OPM di Tangan Wenda Bersaudara*. Jakarta: CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191202092429-106-453258/jejak-opm-di-tangan-wenda-bersaudara>.
- Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua di Jakarta. 2018. *Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua di Jakarta*. 09 Juli. Accessed Maret 25, 2022. <https://penghubung.papua.go.id/2018/07/09/partisipasi-indonesia-di-macfest-2018-festival-melanesia-di-honiara-solomon-islands/>.
- BBC NEWS Indonesia. 2019. *Asrama Papua: Cek fakta kasus bendera merah putih dan makian rasialisme di Surabaya*. Jakarta: BBC NEWS Indonesia.
- BBC News Indonesia. 2016. *Pertemuan bahas Papua merdeka bakal digelar di London*. News, Jakarta: BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160502_indonesia_papua_ipwp.
- Bonasir, Rohmatan. 2013. *Lobi Papua merdeka 'digalakkan' di luar Indonesia*. News, Jakarta: BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/05/130518_papua_merdeka_benny_wenda.
- Chief Benny Wenda. 2016. *Press Release: West Papuan Independence Leader Benny Wenda visits Ghana*. 23 Maret. <https://www.freewestpapua.org/2016/03/23/press-release-benny-wenda-visits-ghana/>.
- CNN Indonesia. 2021. *6 Negara Pasifik yang Getol Singgung Isu HAM Papua di PBB*. Jakarta: CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210927171055-113-700097/6-negara-pasifik-yang-getol-singgung-isu-ham-papua-di-pbb>.
- CNN Indonesia. 2019. *Dewan HAM PBB Disebut Takkan Tangani Petisi Referendum Papua*. News, Jakarta: CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190202134731-134-365958/dewan-ham-pbb-disebut-takkan-tangani-petisi-referendum-papua>.
- CNN Indonesia. 2020. *Di Sidang PBB, RI Minta Vanuatu Berhenti Campuri Urusan Papua*. News, Jakarta: CNN Indonesia.
- CNN Indonesia. 2019. *Pangdam XIV Kirim 600 Prajurit Bantu Keamanan Trans Papua*. Jakarta: CNN Indonesia.
- CNN Indonesia. 2019. *RI Kecam Vanuatu karena 'Selundupkan' Benny Wenda ke PBB*. Jakarta: CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190130101802-134-364973/ri-kecam-vanuatu-karena-selundupkan-benny-wenda-ke-pbb>.

- CNN Indonesia. 2019. *RI Vonis WN Polandia 5 Tahun Bui Terkait OPM*. Jakarta: CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190502201114-106-391499/ri-vonis-wn-polandia-5-tahun-bui-terkait-opm>.
- Deplu RI. 2001. *Kebijakan RI di Pasifik, upaya mencegah separatisme di Irian Jaya*. Surabaya: Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- DPR RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta: DPR RI .
- Elisabeth, Adriana. 2006. "DIMENSI INTERNASIONAL KASUS PAPUA." *Jurnal Penelitian Politik* 3 (1): 23.
- Fadhilah, Muhammad. 2019. "Inkonsistensi Kebijakan Luar Negeri Melanesia Spearhead Group (MSG) dalam Isu Papua Barat: Studi Kasus Fiji dan Papua Nugini." *Indonesian Perspective* 4 (1).
- Fauzan, Ahmad. 2018. "Gerakan Masyarakat Sipil Transnasional ." *Kabar Kampus* 3-4.
- Free West Papua Campaign. 2016. *Seven countries support West Papua at the UN General Assembly*. 27 September. <https://www.freewestpapua.org/2016/09/27/seven-countries-support-west-papua-at-the-un-general-assembly/>.
- . 2016. *Solomon Islands and Vanuatu call for West Papuan human rights to be supported at UN Human Rights Council*. 24 Juni. <https://www.freewestpapua.org/2016/06/24/solomon-islands-and-vanuatu-call-for-west-papuan-human-rights-to-be-supported-at-un-human-rights-council/>.
- . 2017. *Vanuatu supports West Papuan self-determination at the United Nations General Assembly*. 22 September. <https://www.freewestpapua.org/2017/09/22/vanuatu-supports-west-papuan-self-determination-at-the-united-nations-general-assembly/>.
- Free West Papua Champaign . 2020. *245 new political prisoners in West Papua*. 7 Desember. <https://www.freewestpapua.org/2020/12/07/245-new-political-prisoners-in-west-papua/>.
- Free West Papua Champaign. 2020. *245 new political prisoners in West Papua*. 07 Desember. <https://www.freewestpapua.org/2020/12/07/245-new-political-prisoners-in-west-papua/>.
- . 2018. *Melanesian Arts and Culture festival. Indonesia tries to stop Melanesians supporting West Papua*. 11 Juli. <https://www.freewestpapua.org/2018/07/11/melanesian-arts-and-culture-festival-indonesia-tries-to-stop-melanesians-supporting-west-papua/>.
- . 2016. *Melanesian identity is growing in West Papua, in resistance to the increasing repression of the West Papuan people*. 6 October. <https://www.freewestpapua.org/2016/10/06/melanesian-identity-is-growing-in-west-papua-in-resistance-to-the-increasing-repression-of-the-west-papuan-people/>.

- . 2019. *Polish tourist sentenced to 5 years in jail by Indonesia*. 4 Mei.
<https://www.freewestpapua.org/2019/05/04/polish-tourist-sentenced-to-5-years-in-jail-in-west-papua/>.
- Freewestpapua.org. 2019. *Indonesia sends 600 Indonesian soldiers to secure controversial road in West Papua*.
<https://www.freewestpapua.org/2019/03/07/indonesia-sends-600-indonesian-soldiers-to-secure-controversial-road-in-west-papua/> March.
- Gregoire, Paul. 2017. *Time to Support West Papua: An Interview with Independence Leader Benny Wenda*. News, Sydney: Sydney Criminal Lawyers.
<https://www.sydneycriminallawyers.com.au/blog/time-to-support-west-papua-an-interview-with-independence-leader-benny-wenda/>.
- Handayani, Andina Sari, and Saiful Bachri. 2012. "Upaya Pemerintah Turki Dalam Mengatasi Gerakan Separatisme Suku Kurdi Tahun 1984-2007." *Jurnal Candi*.
- Hastuti, Maya. 2011. "Opsi Jalan Tengah Dalai Lama Dalam Penyelesaian Konflik China Tibet." *Jurnal Studi Hubungan Internasional* 1 (1).
- Keck, Margaret E., and Kathryn Sikkink. 1999. "Transnational Advocacy Networks In Internasional And Regional Politics." *International Social Science Journal* 98.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2020. *[HOAKS] TNI dan POLRI Melakukan Tindakan Kekerasan Terhadap Warga Sipil di Paniai Papua*. News, Jakarta: Kominfo.go.id. https://kominfo.go.id/content/detail/27100/hoaks-tni-dan-polri-melakukan-tindakan-kekerasan-terhadap-warga-sipil-di-paniai-papua/0/laporan_isu_hoaks.
- Kementerian Luar Negeri RI. 2019. *Pacific Island Forum (PIF)*. 08 April.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/132/halaman_list_lainnya/pacific-island-forum-pif.
- Khatimah, Husnul. 2018. "POSISI DAN PERAN MEDIA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT." *Tasamuh* 120.
- Kusuma, Mahendra. 2020. "INTEGRASI PAPUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 4 (2): 31-38.
<http://ejournal.unitaspalembang.ac.id/index.php/jhttp/article/view/194>.
- Nainggolan, P P. 2014. "Aktivitas Internasional Gerakan Separatisme Papua." *Kajian* 19 (3).
- News, SABC, interview by Benny Wenda. 2015. *Indonesia currently exploiting, killing indigenous people: Benny Wenda* (28 Februari).
<https://www.youtube.com/watch?v=IEaTvMobgVM>.
- Noor, Firman. 2016. "Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Separatisme Papua." *Jurnal Pertahanan* 6 (3).
- Nugroho, Iman. 2017. *OPM Ungkap Alasan Jadikan Freeport 'Medan Tempur'*. News, Jakarta: CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171114144000-74-255564/opm-ungkap-alasan-jadikan-freeport-medan-tempur>.

- Office of Benny Wenda . 2017. *Benny Wenda presents West Papuan People's Petition to Jeremy Corbyn*. 9 September. Accessed Desember 8, 2021. <https://www.bennywenda.org/2017/benny-wenda-presents-west-papuan-peoples-petition-jeremy-corbyn/>.
- Office Of Benny Wenda. 2017. *Benny Wenda launches Westminster Declaration for West Papua in Aotearoa New Zealand parliament*. 10 Mei. Accessed Desember 06, 2021. <https://www.bennywenda.org/2017/benny-wenda-launched-westminster-declaration-west-papua-aotearoa-new-zealand-parliament/>.
- Office of Benny Wenda. 2020. *Invite your MP to our Parliamentary meeting on West Papua!* 27 Februari. Accessed Desember 8, 2021. <https://www.bennywenda.org/2020/invite-your-mp-to-our-parliamentary-meeting-on-west-papua/>.
- Pratiwi, Eka Auliana. 2019. "Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)." *Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* 2 (2).
- Presiden Republik Indonesia. 2020. *INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020*. Instruksi Presiden, Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Pulungan, M Sofyan. 2003. "Dinamika Konflik Di Papua Pasca Orde Baru." *Hukum dan Pembangunan* 4.
- Ramadhan, Fitra Moerat. 2018. *24 Pekerja Trans Papua Diduga Diserang Kelompok Egianus Kogoya* . Jakarta: Tempo.co.
- Ramadhan, Fitra Moerat. 2018. *Sayap OPM Kelompok Egianus Kogoya Meneror Pekerjaan Trans Papua*. Jakarta: Tempo.co.
- Ruhaeni , Neni, and Intan R. A Herayani. 2017. "Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri menurut Hukum Internasional dihubungkan dengan Gerakan Organisasi Papua Merdeka." *Prosiding Ilmu Hukum* 3 (1).
- Sabir, Ahmad. 2018. "Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua." *Jurnal Hubungan Internasional* 11 (1).
- Saltford, John. 2002. "The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969." *The Anatomy Of Betrayal* 61.
- Sefriani. 2003. "Separatisme dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka." *UNISIA* 47.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. "MEMAHAMI METODE KUALITATIF." *MAKARA, SOSIAL HUMANIORA* 9 (2): 57-65.
- Somantri, Gumilar Rosliwa. 2005. "MEMAHAMI METODE KUALITATIF." *MAKARA, SOSIAL HUMANIORA* 9 (2): 57-65.
- Tarrow, Sidney. 2005. *Externalizing Contention*. Vol. 143, in *In The New Transnational Activism*, 143. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9780511791055/type/book>.

- . 2005. *The New Transnational Activism*. New York: Cambridge University Press.
- Temaluru, Thomas Bagus Putera. 2016. "Kepentingan Vanuatu Dalam Usaha Pemerdekaan Papua." *Jurnal Hubungan Internasional* 5 (2).
- ULMWP. 2016. *Indonesia supports Palestinian independence. What about West Papua?* 7 Maret. <https://www.ulmwp.org/4618-2>.
- . 2016. *Mass rally in Vanuatu calls for West Papua's MSG membership*. 29 April. Accessed Februari 12, 2022. <https://www.ulmwp.org/mass-rally-vanuatu-calls-west-papuas-msg-membership>.
- . 2016. *Melanesian identity is growing in West Papua, in resistance to the increasing repression of the West Papuan people*. 6 Oktober. <https://www.freewestpapua.org/2016/10/06/melanesian-identity-is-growing-in-west-papua-in-resistance-to-the-increasing-repression-of-the-west-papuan-people/>.
- . 2016. *Opening of ULMWP office in Wamena, West Papua*. 15 Februari. <https://www.ulmwp.org/opening-ulmwp-office-wamena-west-papua>.
- ulmwp. 2020. *Urgent alert: Indonesian military depopulating villages to protect Freeport gold mine*. 10 Maret. <https://www.ulmwp.org/urgent-alert-indonesian-military-depopulating-villages-to-protect-freeport-gold-mine>.
- ULMWP. 2015. *West Papua makes history with political recognition*. 26 Juni. <https://www.ulmwp.org/west-papua-makes-history-political-recognition>.
- UNPO. 2016. *Unpresented Nations and Peoples Organizations*. 02 November. Accessed Maret 25, 2022. <https://unpo.org/article/19609>.
- . 2018. *Unpresented Nations and Peoples Organizations*. 16 Maret. Accessed Maret 25, 2022. <https://unpo.org/article/20686>.
- . 2017. *Unpresented Nations and Peoples Organizations*. 27 September. Accessed Maret 25, 2022. <https://unpo.org/article/20360>.
- . 2019. *Unpresented Nations and Peoples Organizations*. 30 Januari. Accessed Maret 25, 2022. <https://unpo.org/article/21351>.
- . 2020. *Unpresented Nations and Peoples Organizations*. 20 Juli. Accessed Maret 25, 2022. <https://unpo.org/article/21988>.
- . 2010. *Unpresented Nations and Peoples Organizations*. Accessed Maret 25, 2022. <https://unpo.org/section/2>.
- Wenda, Benny, interview by SABC News. 2015. *Indonesia currently exploiting, killing indigenous people: Benny Wenda* (28 February). <https://www.youtube.com/watch?v=IEaTvMbgVM>.
- . 2018. *The Indonesian President must immediately withdraw the Indonesian military from West Papua*. 18 Desember. <https://www.bennywenda.org/2018/the-indonesian-president-must-immediately-withdraw-the-indonesian-military-from-west-papua/>.

Zahadi, M. Syaprin, and Musfiroh. 2018. " The Melanesian Spearhead Group in terms of Indonesia"s." *University of Muhammadiyah Malang* 165-172.

